

Katalog : 4102002.51



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI 2020

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI 2020

ISSN : 2797-2623
Katalog : 4102002.51
No. Publikasi : 51000.2138
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 82 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Penyunting Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Dicetak oleh :

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau meng-
gandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik”*

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI 2020

Penanggung Jawab Umum:

Hanif Yahya, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Kadek Muriadi Wirawan, SE, M.Si

Editor:

Kadek Muriadi Wirawan, SE, M.Si

Penulis Naskah:

Ni Luh Putu Dewi Kusumawati, SST, M.Si

Pengolah Data:

Ni Luh Putu Dewi Kusumawati, SST, M.Si

Layout:

Ketut Ksama Putra, SST

Desain Kulit:

Ketut Ksama Putra, SST

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali 2020. Publikasi ini memuat informasi tentang perkembangan capaian dan posisi pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Provinsi Bali hingga tahun 2020.

Angka IPM yang disajikan dalam publikasi ini meliputi angka provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu dapat diketahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Metode penyajian dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif menggunakan pendekatan tabel, grafik, dan peta tematik untuk mempermudah pengguna data dalam memahami perkembangan capaian IPM beserta indikator penyusunnya. Sebagai bahan perbandingan, juga disajikan perkembangan capaian IPM provinsi-provinsi se-Jabalnusra (Jawa Bali Nusa Tenggara).

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan makna dan manfaat untuk semua pengguna data. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Denpasar, Oktober 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali



Hanif Yahya, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv
Bab 1 Mendefinisikan dan Mengukur Pembangunan Manusia	
1.1 Sejarah	3
1.2 Mendefinisikan Pembangunan Manusia.....	5
1.3 Mengukur Pembangunan Manusia	8
1.4 Capaian dan Kecepatan	11
1.5 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	11
Bab 2 Capaian Pembangunan Manusia Provinsi Bali	
2.1 Pembangunan Manusia di Bali Melambat di Tengah Pandemi	15
2.2 Perbandingan Antarwilayah Se-Jabalnusra.....	24
2.3 Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota	28
2.4 Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	32
Bab 3 Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia Provinsi Bali	
3.1 Hidup Lebih Lama dan Kesehatan yang Lebih Baik	40
3.2 Pendidikan Memperluas Peluang.....	47
3.3 Peningkatan Standar Hidup Layak.....	49
Bab 4 Disparitas Pembangunan Manusia Provinsi Bali	
4.1 Disparitas Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.....	55
4.2 Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah.....	65
4.3 Disparitas Pembangunan Manusia di Wilayah Sarbagita dan Non-Sarbagita.....	67
4.4 Disparitas Pembangunan Manusia Berdasarkan Gender.....	69
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia.....	11
Tabel 2.2	Capaian IPM dan Komponen IPM Bali, 2020.....	17
Tabel 4.1	Posisi Kabupaten/Kota dengan Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah, 2020	66

<https://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Aspek Pembangunan Manusia	7
Gambar 2.1	Perkembangan IPM Bali, 2016-2020	18
Gambar 2.2	Umur Harapan Hidup Bali, 2016-2020	19
Gambar 2.3	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Bali, 2016-2020	20
Gambar 2.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali	21
Gambar 2.5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali 2016-2020	22
Gambar 2.6	Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Bali (Perkapita/ Tahun), 2016-2020 (juta rupiah)	23
Gambar 2.7	IPM di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020	24
Gambar 2.8	Umur Harapan Hidup di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020	25
Gambar 2.9	Harapan Lama Sekolah di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020	26
Gambar 2.10	Rata-rata Lama Sekolah di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020	27
Gambar 2.11	Pengeluaran perkapita di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020	28
Gambar 2.12	IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia	29
Gambar 2.13	IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020	30
Gambar 2.14	Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bali, 2019-2020	31
Gambar 2.15	Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Bali, 2016-2020	32
Gambar 2.16	Tingkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020	33
Gambar 2.17	Tingkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020	34
Gambar 2.18	Tingkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020	35
Gambar 2.19	Tingkatan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020	36

Gambar 3.1	Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)	41
Gambar 3.2	Indikator Lingkungan Bali, 2020	43
Gambar 3.3	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan di Bali, 2016-2020	45
Gambar 3.4	Jumlah Konsumsi Rokok perkapita Sebulan di Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020 (batang)	46
Gambar 3.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Bali, 2016-2020 (persen)	48
Gambar 3.6	Angka Partisipasi Murni (APM) Bali, 2016- 2020 (Persen)	49
Gambar 3.7	Tren Kemiskinan di Bali Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2015-2020 (Persen)	50
Gambar 3.8	Tren Gini Rasio Bali Menurut Perkotaan dan Perdesaan di Bali, 2016-2020	51
Gambar 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali, 2016-2020 (Persen)	52
Gambar 4.1	Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2016-2020	56
Gambar 4.2	Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bali, 2016-2020	57
Gambar 4.3	Selisih UHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2016-2020	58
Gambar 4.4	Rata-rata Pertumbuhan UHH Kabupaten/Kota di Bali, 2016-2020	59
Gambar 4.5	Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2016-2020	60
Gambar 4.6	Rata-rata Pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota di Bali, 2016-2020	61
Gambar 4.7	Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bali, 2016-2020	62
Gambar 4.8	Rata-rata Pertumbuhan RLS Kabupaten/Kota di Bali, 2016-2020	63
Gambar 4.9	Selisih PPP Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2016-2020	64
Gambar 4.10	Rata-rata Pertumbuhan PPP Kabupaten/Kota di Bali, 2016-2020	65

Gambar 4.11	Perbandingan IPM Wilayah Sarbagita dengan Non-Sarbagita di Provinsi Bali, 2020	68
Gambar 4.12	Perbandingan IPM Wilayah Sarbagita dengan Non-Sarbagita di Provinsi Bali Menurut Status, 2020	69
Gambar 4.13	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bali, 2016-2020	70

<https://bali.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2020	77
Lampiran 2	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2016-2020	78
Lampiran 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020	79
Lampiran 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019	79
Lampiran 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2018	80
Lampiran 6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2017	80
Lampiran 7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2016	81



BAB 1

**Mendefinisikan dan
Mengukur Pembangunan
Manusia**

1

MENDEFINISIKAN DAN MENGUKUR PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1 Sejarah

Kemajuan pembangunan suatu negara pada awalnya hanya diukur berdasarkan besaran pendapatan Nasionalnya dan pertumbuhan ekonominya saja. Namun, setelah perang dunia kedua, berbagai paradoks terjadi di berbagai wilayah, terutama di negara dunia ketiga (negara berkembang). Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang mengalami pergerakan yang cukup menjanjikan. Alih-alih mengharapkan teraktualisasinya teori *trickledown effect* dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan kontribusi ke lapisan yang ada di bawahnya seperti yang terjadi pada negara maju, yang terjadi di negara-negara berkembang justru anomali. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang cukup signifikan tidak dibarengi dengan menurunnya kemiskinan, kesejahteraan rakyat makin terjamin, dan turunnya kriminalitas. Justru sebaliknya, angka kemiskinan semakin meningkat dan jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar, angka kriminalitaspun tidak dapat dikatakan sedikit. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lebar. Hal ini mendorong para pengamat pembangunan mencari ukuran pembangunan yang lebih bisa menggambarkan kemajuan pembangunan di suatu negara.

Gagasan Amartya Sen pada dekade 1990 an, yang memfokuskan pada pembangunan manusia, karena hakikat pembangunan semestinya adalah bagaimana masyarakatnya dapat mengakses lebih besar ke pengetahuan, kesehatan yang lebih baik, kebebasan memilih mata pencaharian yang lebih baik, keamanan, dan kebebasan untuk berbudaya dan berpolitik. Kemudian, muncullah berbagai diskusi mengenai isu ini dikarenakan makin banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi disertai dengan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat

kesehatan, dan masalah sosial lainnya yang berhubungan dengan manusia.

UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 akhirnya menerbitkan laporan *Human Development Report 1990*, yaitu suatu laporan untuk menanggapi isu yang sedang berkembang pada saat itu. Di dalam laporan tersebut UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus merupakan input pembangunan.

Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan UNDP memberikan nuansa baru dalam memahami pembangunan. Cara pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain:

- Pertumbuhan Pendapatan Nasional merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan pendapatan saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun pendapatan nasional atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi atau sebaliknya.
- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Keduanya hanya fokus dengan sisi penawaran, yaitu manusia dipandang sebagai alat untuk memajukan produksi komoditas. Hal ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat karena manusia adalah agen aktif dari kegiatan produksi. Akan tetapi, manusia memiliki nilai lebih dari barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat memandang manu-

sia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai peserta di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.

- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

Dengan kata lain, pembangunan manusia berarti perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat dan perluasan kapabilitas untuk memenuhi aspirasi. Pembangunan manusia juga berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, dan menjadi tujuan akhir dari segala macam pembangunan.

1.2 Mendefinisikan Pembangunan Manusia

Beberapa ahli mengemukakan tentang konsep pembangunan manusia yang menyiratkan bahwa pembangunan manusia memiliki aspek yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Amartya Sen (1989) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Mahbub Ul Haq (1995) juga mengemukakan hal serupa. Ia berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan, yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Kedua ahli tersebut merupakan cikal bakal lahirnya konsep pembangunan manusia yang digunakan UNDP yang menitikberatkan tentang ide dasar pembangunan manusia, yaitu:

- Manusia
Pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas

kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dibandingkan dengan hanya mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam sudut pandang ini, pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai alat untuk pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan.

- Kesempatan

Pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya. Misalnya, mendidik seseorang perempuan secara tidak langsung akan membangun keterampilannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan banyak berguna jika dia tidak diberi akses ke pekerjaan atau tidak memiliki keterampilan yang tepat dalam pasar tenaga kerja lokal. Tiga landasan penting dalam pembangunan manusia adalah berumur panjang, sehat dan kreatif; berpengetahuan luas; dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Banyak hal lain yang juga penting, terutama dalam membantu menciptakan kondisi yang tepat untuk pembangunan manusia. Beberapa di antaranya terdapat dalam gambar di bawah ini. Apabila dasar-dasar pembangunan manusia dapat tercapai, masyarakat dapat membuka peluang untuk kemajuan dalam aspek kehidupan lainnya.

- Pilihan

Pembangunan manusia pada dasarnya membahas tentang lebih banyak pilihan. Pembangunan manusia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati pilihannya, bukan memaksa mereka memanfaatkannya. Tidak ada yang dapat menjamin kebahagiaan manusia dan pilihan yang dibuat setiap orang adalah tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan bagi masyarakat, baik secara individu

maupun kolektif, untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal. Pembangunan manusia juga harus memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang produktif dan kreatif.

Gambar 1.1 Aspek Pembangunan Manusia



Sumber: <http://undp.org/en/content/what-human-development>

Berdasarkan ide tersebut, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan manusia. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan, dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup secara layak. Apabila ketiga hal tersebut tidak dimiliki maka pilihan lain akan sulit diakses.

Selain ketiga hal mendasar tersebut, terdapat aspek lain yang juga perlu diupayakan dalam pembangunan manusia. Aspek lain tersebut diantaranya adalah kebebasan dalam berpolitik, ekonomi dan sosial. Kebebasan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi kreatif dan produktif, memiliki harga diri pribadi, dan merasakan adanya jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi yang saling mendukung, yaitu pembentukan kapasitas manusia dan pemanfaatannya. pembentukan kapabilitas manusia mencakup upaya peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sedangkan pemanfaatannya mencakup penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Kedua sisi tersebut idealnya terbangun secara seimbang agar capaian pembangunan manusia menjadi optimum dan berkesinambungan.

1.3 Mengukur Pembangunan Manusia

Pengukuran dan monitoring pembangunan manusia dapat mencakup banyak variabel agar memberikan gambaran yang komprehensif. Namun, terlalu banyak variabel juga dapat memberikan gambaran yang membingungkan. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Salah satu tolok ukur capaian pembangunan manusia dari beberapa aspek dijelaskan melalui Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index* (IPM/HDI). Indikator ini dikembangkan kali pertama oleh ekonom asal Pakistan, Mahbub ul Haq, pada tahun 1990. Dalam perkembangannya, IPM semakin menjadi perhatian pemerintah di berbagai belahan dunia karena beberapa alasan. Setidaknya jika diuraikan, terdapat beberapa alasan utama pendorong IPM begitu diperhatikan.

Sejak diperkenalkan pada tahun 1990, metode penghitungan IPM telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2010, UNDP merevisi metode penghitungan IPM secara mendasar. Indikator melek huruf diganti dengan indikator harapan lama sekolah. Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita digantikan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Demikian halnya dengan metode agregasi pembentukan IPM yang mengalami penyempurnaan. Jika semula metode penghitungan menggunakan rata-rata aritmatik, diubah menjadi rata-rata geometrik.

Di Indonesia sendiri, IPM telah dirilis sejak tahun 1996 dengan

periode berkala tiga tahunan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah terutama terkait dengan penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004, IPM telah dihitung setiap tahun. Sejak tahun 2014, metode penghitungan IPM di Indonesia telah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita digunakan sebagai proksi penghitungan PNB yang belum tersedia di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Beberapa sumber data yang dijadikan dasar pijakan penghitungan IPM di Indonesia antara lain, hasil Sensus Penduduk dan Proyeksi Penduduk untuk menghitung umur harapan hidup saat lahir serta hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk menghitung angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Data-data tersebut dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi penyedia data di Indonesia.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang terangkum dari pendekatan tiga dimensi dasar manusia, meliputi umur panjang dan sehat (sebagai ukuran *longevity*), pengetahuan/pendidikan (sebagai ukuran *knowledge*), dan standar hidup layak/tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards*).

Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa berbagai faktor yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan umur harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang bersumber dari Sensus Penduduk tahun 2010. Metode estimasi yang digunakan adalah metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan sejarah kependudukan dan kondisi

Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya. Indeks harapan hidup dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), yang merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan dalam kehidupan produktif masyarakat modern. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk umur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama. Adapun dalam penghitungan indeks HLS dan RLS digunakan batas nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP yaitu masing-masing 15 dan 0 tahun.

Sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator pengeluaran riil per kapita mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari semakin membaiknya perekonomian. Data rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan hasil Susenas modul konsumsi, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.

1.4 Capaian dan Kecepatan

Kemajuan dalam pembangunan manusia memiliki dua perspektif. Pertama adalah pencapaian yang menggambarkan apa yang telah dicapai. Capaian yang lebih besar menunjukkan adanya kemajuan yang lebih baik. Kedua adalah kecepatan perubahan pembangunan manusia. Kecepatan menunjukkan besarnya perubahan pembangunan manusia yang berhasil dicapai dalam suatu rentang waktu tertentu.

Dalam banyak kasus, capaian pembangunan manusia pada wilayah yang sudah tinggi cenderung menunjukkan kecepatan yang rendah. Sebaliknya, capaian pembangunan manusia pada wilayah yang masih rendah cenderung memiliki kecepatan tinggi.

Capaian IPM di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan menjadi empat kelompok. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 1.1. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

1.5 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Penyajian IPM secara periodik menurut daerah memungkinkan setiap kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia di daerahnya, baik capaian, kecepatan, posisi, maupun disparitas antardaerah. Manfaat lainnya adalah sebagai salah satu indikator target pembangunan dan saah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), dan juga sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai salah satu indikator dalam pengalokasian DID.



BAB 2

Capaian Pembangunan Manusia Provinsi Bali

2

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI

2.1. Pembangunan Manusia di Bali Melambat di Tengah Pandemi

Sejak awal tahun 2020, dunia digegerkan dengan adanya Virus Corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus ini sangat cepat menyebar seiring pesatnya mobilitas masyarakat dunia. Sampai akhirnya pada Maret 2020 keadaan di dunia sudah dinyatakan sebagai Pandemi. Indonesiapun tak luput dari serangan virus ini, yang penyakitnya disebut sebagai Covid-19. Pandemi ini memaksa pengurangan mobilitas penduduk, bekerja dari rumah (*Work From Home*), belajar dari rumah (*School From Home*), dan beribadah di rumah. Perekonomian di seluruh dunia mengalami guncangan. Pandemi Covid-19 setidaknya mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, pengaruh pandemi dipicu oleh turunnya permintaan barang dan jasa negara mitra dagang, turunnya minat investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dari sisi internal, pengaruh pandemi dipicu oleh penurunan aktivitas produksi, konsumsi dan investasi akibat pembatasan kegiatan dan interaksi yang ditujukan untuk mencegah penularan virus. Keseluruhan faktor tersebut saling berinteraksi dan secara keseluruhan memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkonstraksi (tumbuh negatif) sebesar 2,07 persen. Begitu pula halnya dengan ekonomi Bali yang sangat tergantung dari kondisi eksternal karena ketergantungannya dengan pariwisata juga mengalami kontraksi ekonomi. Bahkan Bali merupakan provinsi dengan keterpurukan ekonomi yang paling parah di antara provinsi lainnya di Indonesia. Tahun 2020 Bali menutupnya dengan pertumbuhan ekonomi terkonstraksi sebesar 9,31 persen.

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pendidikan yang sebelum pandemi dilakukan dengan tatap muka, sekarang dilakukan dengan virtual. Pemberian beberapa layanan kesehatan yang bersifat konsultatif sebagian besar juga dilaksanakan melalui komunikasi telepon atau secara daring. Transaksi langsung dan kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan kerumunan juga banyak dihindari.

Seluruh indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM. Pada tahun 2020 IPM Bali mencapai 75,50, meningkat 0,12 poin atau tumbuh sebesar 0,16 persen dibandingkan tahun 2019. Dengan demikian, status pembangunan manusia Provinsi Bali masih berada pada level tinggi (berada pada kisaran antara $70 \leq \text{IPM} < 80$). Pertumbuhan IPM tahun 2020 jauh melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,82 persen. Walaupun demikian, IPM Bali tahun 2020 masih mencatatkan posisi tertinggi ke-lima secara nasional, berada di bawah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau.

Dirinci menurut capaian masing-masing komponen pembentuk IPM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tercatat 71,99 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,99 tahun atau lebih lama 0,14 tahun dibandingkan tahun 2019.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat 13,33 tahun. Artinya, anak-anak yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,33 tahun atau setingkat perguruan tinggi semester tiga atau tamat diploma satu. HLS tahun 2020 tercatat lebih lama 0,06 tahun dibandingkan tahun 2019.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat 8,95 tahun. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,95 tahun atau setara SMP tingkat

dua (kelas VIII). RLS tahun 2020 tercatat lebih lama 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

- Pengeluaran riil per kapita disesuaikan tercatat sebesar 13,93 juta rupiah/orang/tahun. Artinya, pada tahun 2020 masyarakat Bali memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 13,93 juta rupiah/orang/tahun atau menurun 217 ribu rupiah dibandingkan tahun 2019.

Perlambatan IPM di masa pandemi Covid-19 ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili oleh variable Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

Tabel 2.2. Capaian IPM dan Komponen IPM Bali, 2020

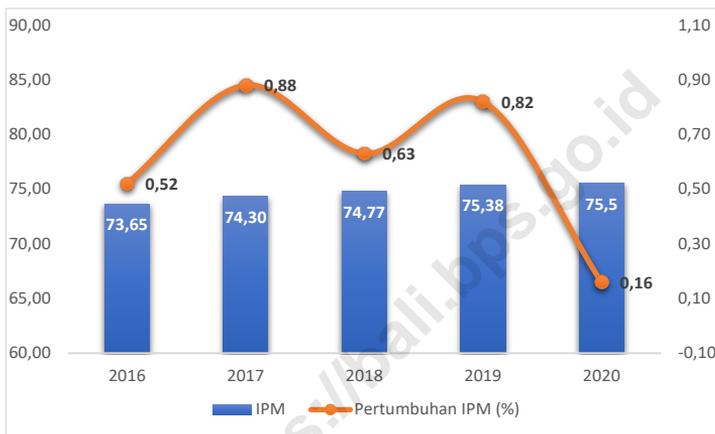
Komponen		Nilai
	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	72,13
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,33
	Rara-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,95
	Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)	Rp 13.929.000,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,50

Sumber: BPS Provinsi Bali

Selain mencermati capaian di satu titik waktu tertentu, menelaah lebih jauh perkembangan antarwaktu dapat menambah cakrawala pengetahuan terkait kondisi pembangunan manusia di suatu wilayah. Berdasarkan data perkembangan IPM Bali pada kurun waktu tahun 2016-2020, tercatat

bahwa setiap tahun pembangunan manusia di Bali mengalami kemajuan. Kondisi ini tergambar dari grafik capaian IPM. Pada tahun 2016, IPM Bali tercatat 73,65 dan terus meningkat hingga mencapai 75,50 pada tahun 2020. Dengan adanya pandemi Covid-19, menyebabkan pada tahun 2020 pertumbuhan IPM Bali melambat menjadi 0,16 persen. Sehingga dalam periode tahun 2016-2020, pertumbuhan IPM secara rata-rata tumbuh 0,62 persen per tahun turun dari rata-rata 2015-2019 yang sebesar 0,71 persen.

Gambar 2.1. Perkembangan IPM Bali, 2016-2020

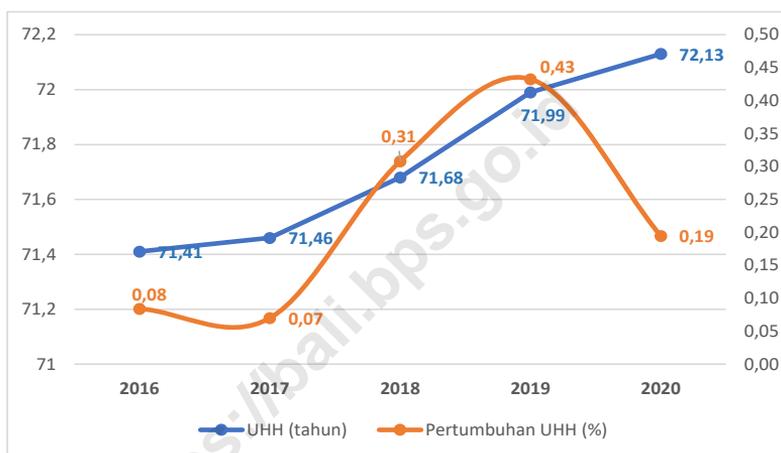


Sumber: BPS Provinsi Bali

Dalam tekanan yang tidak dapat dikatakan ringan, dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pendidikan masih mengalami kemajuan dibandingkan tahun 2019. Lain halnya dengan kedua dimensi tersebut, dimensi kesejahteraan yang dalam hal ini diwakilkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bali sebagai daerah yang sangat menggantungkan ekonominya dari pariwisata, mengalami keterpurukan ekonomi. Setiap negara melakukan pembatasan mobilitas penduduknya, sehingga tak memungkinkan untuk berkunjung ke Bali. Pendapatan penduduk Bali yang sebagian besar adalah bergerak di bidang jasa pariwisata berkurang, sehingga pengeluaran perkapita pun menjadi berkurang. Mari kita lihat satu per satu komponen yang membangun angka IPM.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah terkait ketersediaan sarana prasarana, kemudahan akses pelayanan kesehatan, maupun kualitas kesehatan. Mencermati perkembangan pada kurun waktu tahun 2016-2020, Bali tercatat mampu meningkatkan UHH sebesar 0,72 tahun atau rata-rata tumbuh 0,25 persen per tahun.

Gambar 2.2. Umur Harapan Hidup Bali, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

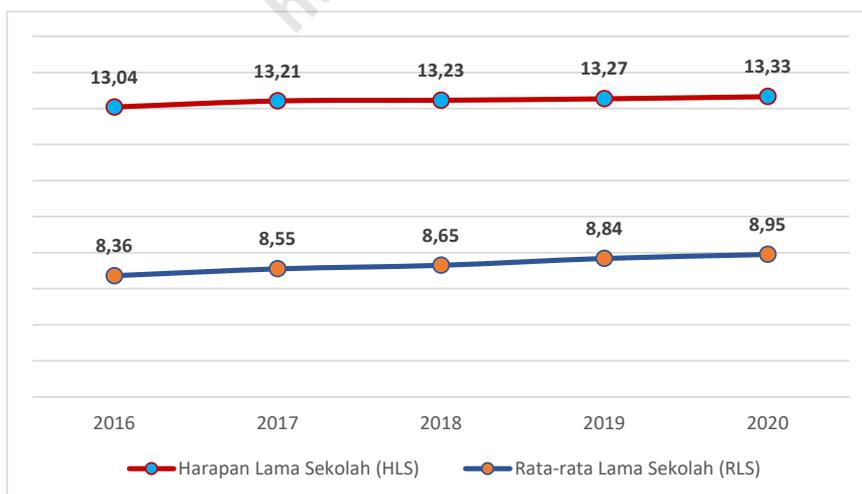
Walaupun indikator Umur Harapan Hidup masih menunjukkan perbaikan, namun perbaikannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pada akhirnya peningkatan UHH pada tahun 2020 juga turut melambat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan UHH yang melambat pada tahun 2020 yang mencapai 0,19 persen, dimana pada tahun sebelumnya sempat mencapai 0,43 persen pada tahun 2019 (sebelum pandemi). Peningkatan UHH turut memberikan peran yang positif pada peningkatan IPM di masa pandemi.

Di sisi lain, dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang. HLS dan

RLS dapat memberikan gambaran tentang penambahan (flow) dan capaian (stock) kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Perkembangan kedua indikator tersebut selama kurun waktu tahun 2016-2020 tercatat terus meningkat. Dalam kurun lima tahun, HLS tercatat meningkat 0,29 tahun, sedangkan RLS tercatat meningkat 0,59 tahun. Peningkatan tersebut menjadi sinyal positif semakin baiknya tingkat pendidikan di Provinsi Bali. Dengan semakin banyaknya anak bersekolah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi niscaya akan berdampak pada perbaikan modal dasar kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bali. Salah satu aspek yang dinilai melemahkan daya saing SDM Bali adalah rendahnya indeks pendidikan. Meski terus meningkat, seyogyanya upaya lebih keras dan lebih cepat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding provinsi lain. Menilik salah satu indikator pendidikan, misalnya RLS, DKI Jakarta tercatat 11,13 tahun, Kepulauan Riau 10,12 tahun, Maluku 9,93 tahun, Kalimantan Timur 9,77 tahun, dan DI Yogyakarta 9,55 tahun.

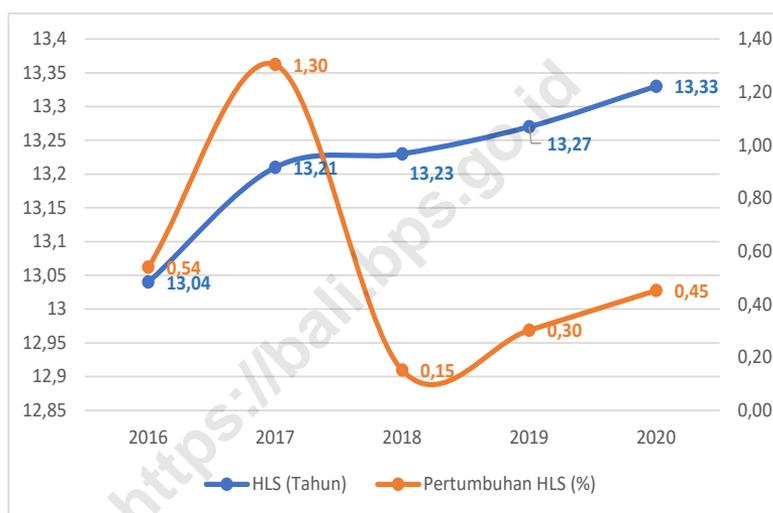
Gambar 2.3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Bali, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Meski indikator HLS terus mengalami peningkatan, pertumbuhan indikator ini mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, pertumbuhan indikator ini mencapai 0,54 persen, meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,30 persen, dan mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2018 sebesar 0,15 persen, dan baru pada tahun 2019 dan 2020 mengalami percepatan yaitu masing-masing sebesar 0,30 persen dan 0,45 persen.

Gambar 2.4. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Bali, 2016-2020



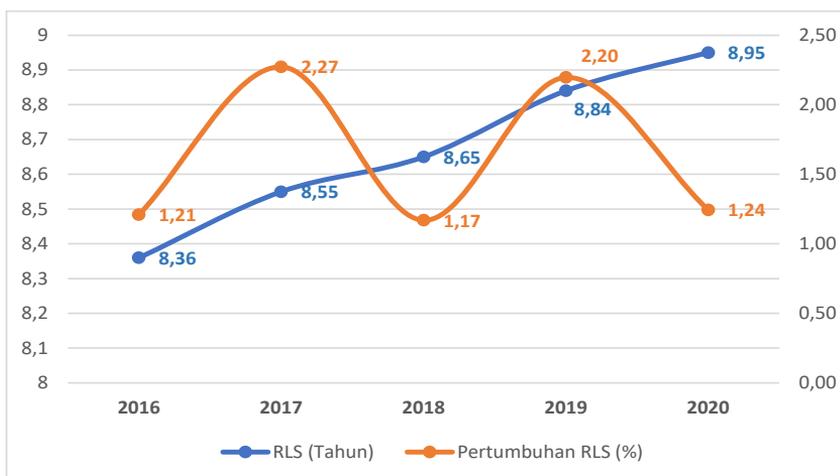
Sumber: BPS Provinsi Bali

Peningkatan HLS pada tahun 2020 dipengaruhi oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di sebagian besar kelompok umur pendidikan khususnya 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada APS 19-24 tahun yang meningkat sebesar 2,91 persen, diikuti oleh APS 13-15 tahun yang meningkat 0,50 persen, dan yang tidak ketinggalan, APS 16-18 tahun yang meningkat sebesar 0,44 persen. Walaupun demikian, APS 7-12 tahun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,14 persen. Namun secara umum, peningkatan APS ini menyebabkan HLS pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya APS 19-24 tahun yang capaiannya masih dibawah 30 persen. Padahal kelompok umur ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal tersebut dimungkinkan karena ketersediaan dan jumlah daya tampung perguruan tinggi yang lebih sedikit dibandingkan jumlah lulusan sekolah menengah atas. Selain itu, hal lain yang juga berpengaruh adalah tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.

Indikator RLS di masa pandemi juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 8,84 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,95 tahun pada tahun 2020 atau meningkat 1,24 persen (0,11 tahun). Peningkatan ini lebih lambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,20 persen atau meningkat 0,19 tahun. Secara alamiah peningkatan RLS sangat dipengaruhi oleh peningkatan APS kelompok umur 19-24 tahun, terutama APS umur 24 tahun. Dengan demikian, upaya peningkatan dimensi pendidikan dapat difokuskan pada peningkatan APS kelompok 19-24 tahun karena dapat sekaligus meningkatkan indikator HLS dan RLS secara bersamaan.

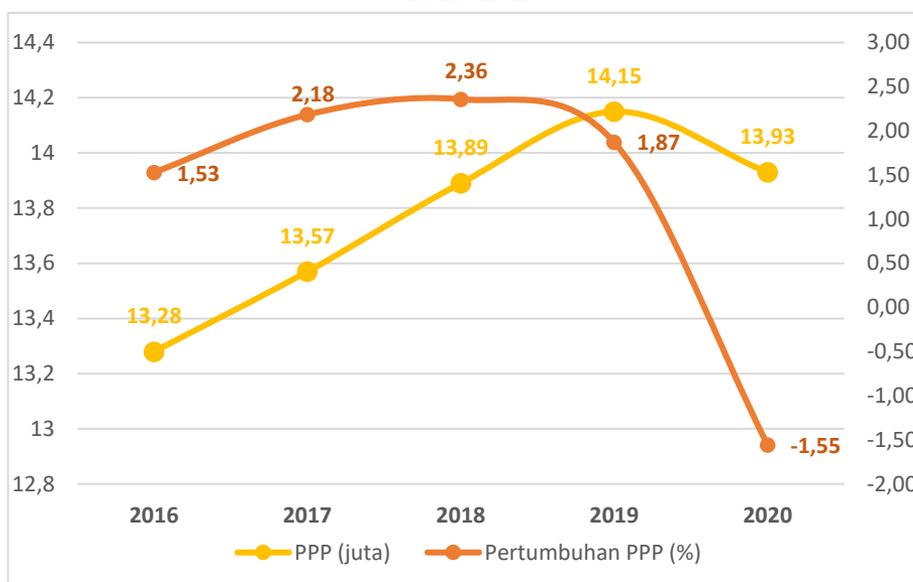
Gambar 2.5. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Bali 2016-2020



Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita. Indikator tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Untuk menjaga keterbandingan antarwilayah, dilakukan standardisasi menggunakan konsep purchasing power parity (PPP): satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan.

Selama kurun waktu 2016-2019 indikator ini selalu tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,98 persen per tahun, tetapi pada periode 2016-2020 turun menjadi 1,28 persen per tahun akibat dampak Covid-19. Pada tahun 2020 pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan adalah sebesar Rp13.929.000, terkontraksi 1,53 persen (turun Rp217.000) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan pada tahun 2018 dengan 2,36 persen dan terendah pada tahun 2020 dengan kontraksi atau pertumbuhan negatif yang tercatat sebesar -1,55 persen. Sebagai catatan, pengeluaran per kapita yang digunakan adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antarwilayah (pengeluaran per kapita disesuaikan).

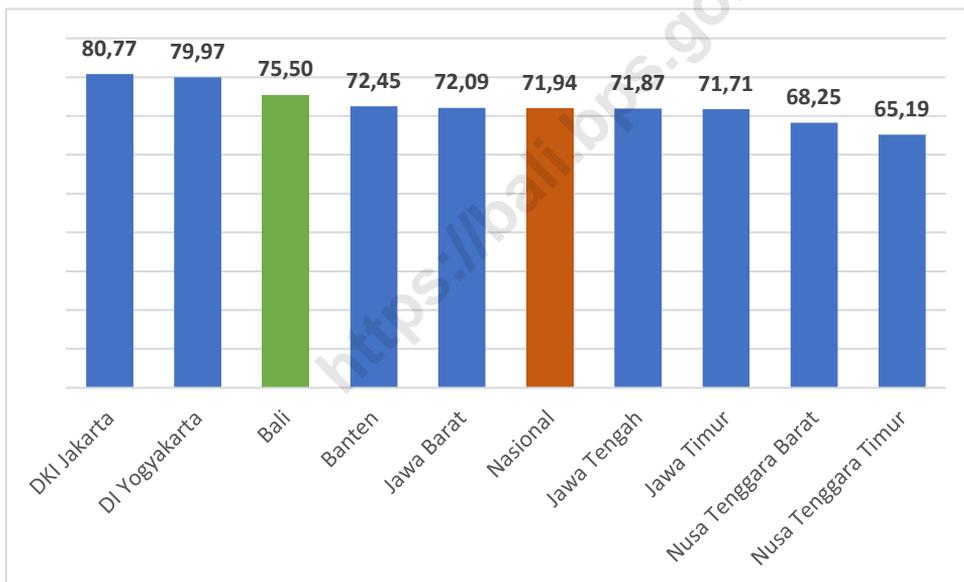
Gambar 2.6. Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Bali (perkapita/tahun), 2016-2020



2.2. Perbandingan Antarwilayah Se-Jabalnusra

Melengkapi analisis keterbandingan antarwaktu, perbandingan antarwilayah dapat menjadi gambaran lain akan perkembangan pembangunan manusia di Provinsi Bali. Mengingat posisi geografis Bali yang terletak di kawasan tengah Indonesia, perkembangan IPM Bali akan disandingkan dengan provinsi-provinsi yang berada dalam kelompok Jabalnusra atau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ditampilkan pula posisi capaian IPM Bali dibandingkan dengan nasional.

Gambar 2.7. IPM di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020

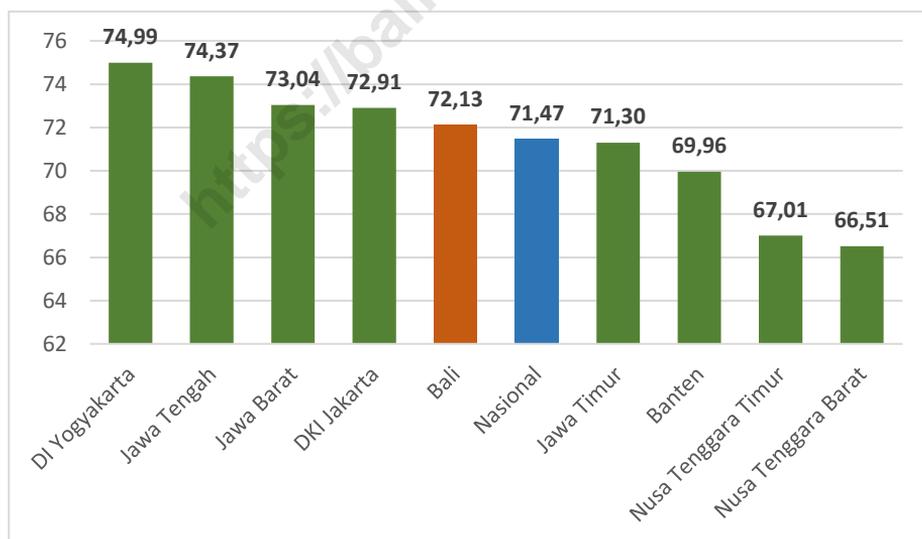


Sumber: BPS Provinsi Bali

IPM Bali tahun 2020 tercatat menjadi tertinggi ketiga di antara sembilan provinsi se-Jabalnusra. Peringkat pertama dicapai oleh DKI Jakarta dengan IPM 80,77, sedangkan terendah di Nusa Tenggara Timur dengan IPM 65,19. Capaian IPM di antara provinsi Jabalnusra juga semakin menguatkan adanya kesenjangan hasil pembangunan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Pada masa

pandemi Covid-19, sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi se-Jabalnusra, Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan IPM yang terendah selama satu dasawarsa terakhir yaitu hanya 0,01 poin dibandingkan tahun 2019. Bahkan Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan capaian IPM masing-masing turun 0,02 poin dan 0,04 poin dibandingkan tahun 2019. Capaian IPM beberapa provinsi yang mengalami perlambatan bahkan penurunan capaian lebih diakibatkan karena penurunan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Banyaknya kasus Covid-19 yang mengakibatkan melemahnya aktivitas ekonomi berkontribusi pada perlambatan bahkan penurunan angka IPM. Beruntung, Bali masih mampu untuk meningkatkan capaian IPM, didukung oleh pencapaian komponen pendidikan yang mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan nasional, IPM Bali tercatat masih berada di atas angka nasional yang tercatat 71,94.

Gambar 2.8 Umur Harapan Hidup di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020



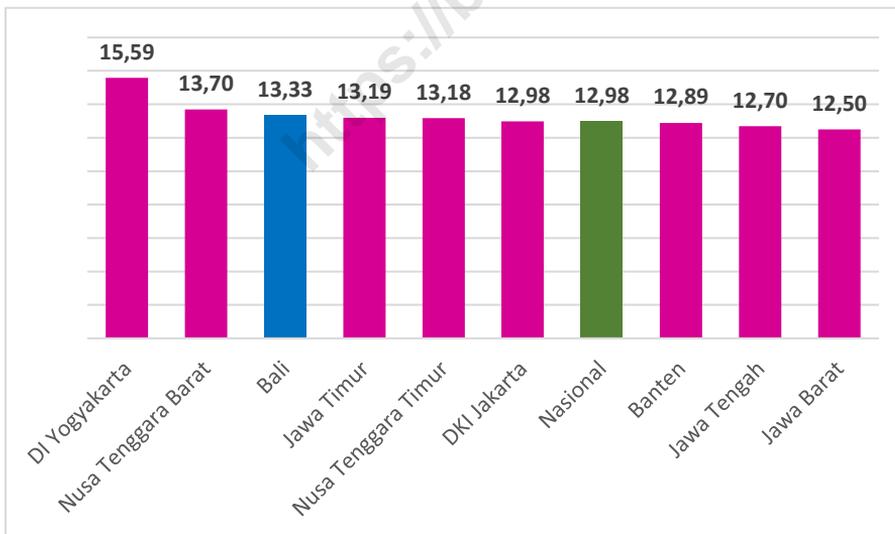
Sumber: BPS Provinsi Bali

Menilik dimensi kesehatan yang ditunjukkan melalui indikator UHH saat lahir, UHH tahun 2020 untuk Provinsi Bali berada pada peringkat kelima se-Jabalnusra. Berada di bawah DI Yogyakarta (74,99 tahun), Jawa Tengah (74,37 tahun), Jawa Barat (73,04 tahun), dan DKI Jakarta (72,91 tahun). Selisih antara UHH DI Yogyakarta (yang juga merupakan UHH tertinggi di Indone-

sia) dan Bali sekitar 2,86 tahun. Meski UHH Bali masih berada sedikit di atas rata-rata nasional, tentu diharapkan perbaikan kualitas kesehatan terutama untuk bayi, balita, dan anak-anak dapat terus ditingkatkan. Pada gilirannya, akan ikut memperpanjang UHH di masa mendatang.

Pada dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS Bali tahun 2020 tercatat 13,33 tahun dan berada pada peringkat ketiga se-Jabalnusra, di bawah DI Yogyakarta (15,59 tahun) dan Nusa Tenggara Barat (13,70 tahun). HLS Bali masih berada di atas angka nasional yang tercatat 12,98 tahun. Demikian halnya dengan RLS Bali tahun 2020 yang juga tercatat berada pada peringkat ketiga se-Jabalnusra dengan RLS selama 8,95 tahun. RLS Bali berada di bawah DKI Jakarta (11,13 tahun) dan DI Yogyakarta (9,55 tahun). Capaian RLS Bali tahun 2020 masih berada di atas RLS nasional yang tercatat 8,48 tahun.

Gambar 2.9 Harapan Lama Sekolah di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020 (dalam tahun)

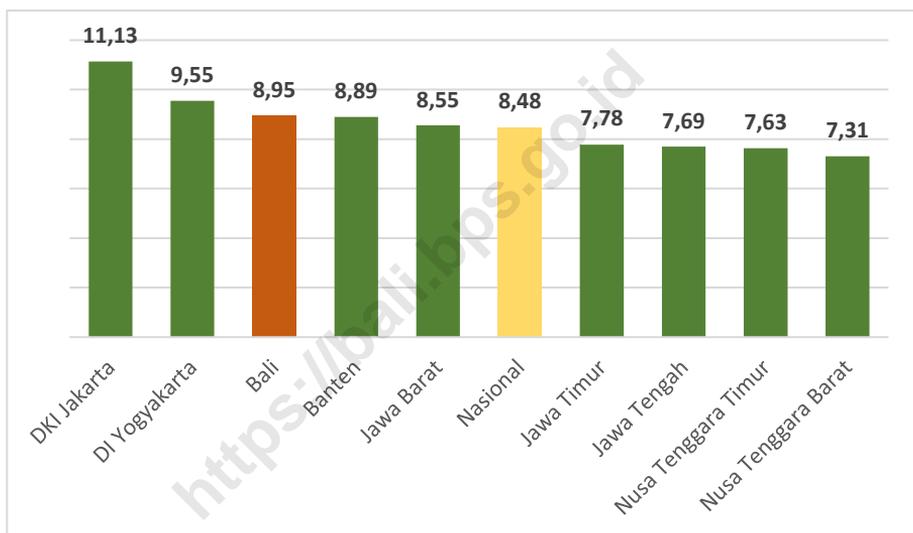


Sumber: BPS Provinsi Bali

Namun, menarik pula mencermati perbandingan HLS dan RLS antara wilayah barat dan timur Indonesia. Bila dilihat dari RLS, Provinsi NTT dan NTB merupakan dua provinsi dengan capaian RLS terendah se-Jabalnusra, mas-

ing-masing selama 7,63 tahun dan 7,31 tahun atau setingkat SMP kelas satu. Namun untuk HLS, provinsi NTB dan NTT justru tercatat mempunyai HLS tinggi dan berada di atas angka nasional. Kondisi ini memberi sinyal masih ada ketimpangan antara realita lapangan dengan ekspektasi yang ada. Meski demikian, dengan tingginya HLS besar peluang untuk menggenjot peningkatan RLS, tidak hanya di kawasan timur Indonesia, tetapi termasuk di kawasan tengah seperti Bali.

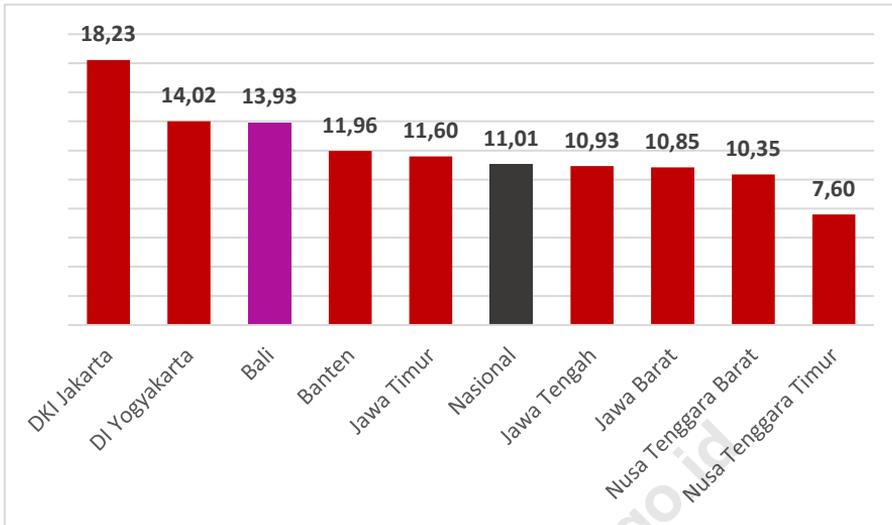
Gambar 2.10 Rata-rata Lama Sekolah di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020 (dalam tahun)



Sumber: BPS Provinsi Bali

Dimensi standar hidup layak diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) Bali tahun 2020 tercatat menempati urutan ketiga terbesar se-Jabalnusra dan keempat terbesar secara nasional. Menilik pengeluaran per kapita tertinggi se-Jabalnusra termasuk dalam lingkup nasional yang dihasilkan di DKI Jakarta, yaitu sebesar 18,23 juta rupiah dan terendah yaitu Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebesar 7,60 juta rupiah sekaligus menjadi kedua terendah secara nasional, menunjukkan masih lebarnya rentang ketimpangan pembangunan manusia dipandang dari sisi ekonomi.

Gambar 2.11 Pengeluaran per Kapita di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2020
(dalam juta rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Bali

2.3. Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Kemajuan pembangunan manusia dapat ditinjau dari sisi capaian status maupun kecepatan pertumbuhan IPM. Mencermati pencapaian di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2020 dari sisi capaian status ditampilkan sesuai Tabel 2.3 dan Gambar 2.10.

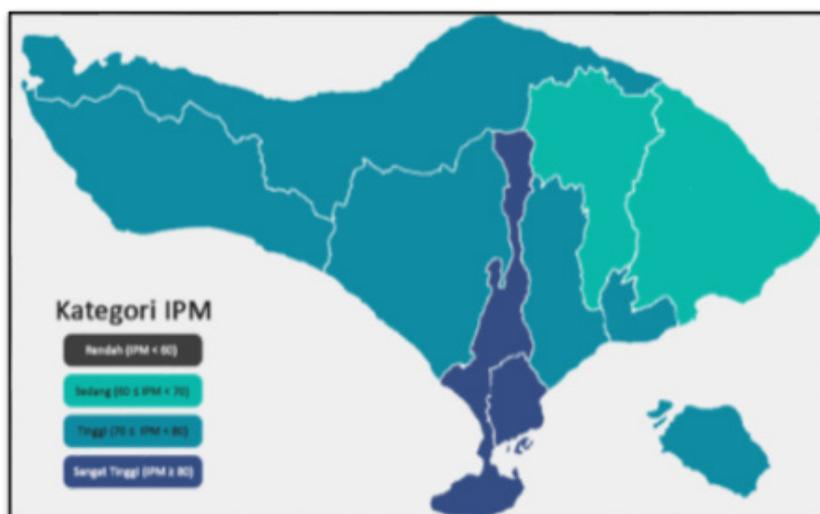
Tabel 2.3 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Bali, 2020

Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Kota Denpasar	Gianyar	Bangli	-
Badung	Tabanan	Karangasem	
	Buleleng		
	Jembrana		
	Klungkung		

Sumber: BPS Provinsi Bali

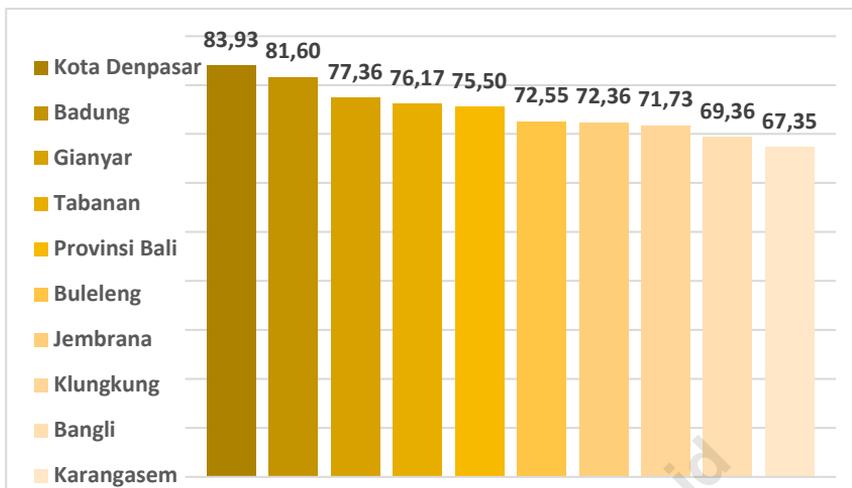
Dampak pandemi Covid-19 juga terlihat pada pencapaian IPM di level kabupaten/kota. Walaupun semua kabupaten/kota mengalami peningkatan capaian IPM, namun kecepatannya berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian pembangunan manusia tahun 2020 di level kabupaten/kota terlihat masih cukup bervariasi. Meski tidak ada yang berada pada status rendah, masih ada dua kabupaten yang berada pada level sedang. Pada lain sisi, ada pula dua kabupaten/kota yang telah berada pada level sangat tinggi. IPM tertinggi pada tahun 2020 masih dicatatkan oleh Kota Denpasar (83,93) diikuti oleh Kabupaten Badung (81,60). Keduanya menjadi kabupaten/kota dengan capaian sangat tinggi. Sebagai catatan, Kota Denpasar telah sejak tahun 2012 tercatat berstatus sangat tinggi, sedangkan Kabupaten Badung menyusul di tahun 2017 sampai sekarang. Pada kelompok capaian tinggi, tercatat terdapat lima kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar (77,36), Kabupaten Tabanan (76,17), Kabupaten Buleleng (72,55), Kabupaten Jembrana (72,36), dan Kabupaten Klungkung (71,73). Dua kabupaten yang tercatat masih berada pada kategori capaian IPM rendah adalah Kabupaten Bangli (69,36) dan Kabupaten Karangasem (67,35).

Gambar 2.12 IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Gambar 2.13 IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Selain dari sudut status capaian IPM, perkembangan pembangunan manusia dapat pula dilihat dari sudut kecepatan pertumbuhan. Selama tahun 2019-2020, tercatat semua kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami perlambatan IPM. Perlambatan disebabkan lebih kepada menurunnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai pendekatan dari komponen kesejahteraan masyarakat. Pada periode tersebut, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Buleleng yang tercatat tumbuh 0,35 persen, diikuti oleh Kota Denpasar (0,30%), dan Kabupaten Gianyar (0,29%). Pada sisi lain, pertumbuhan terlambat tercatat di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli dan Karangasem yang semuanya tumbuh sebesar 0,01 persen dibandingkan tahun 2019. Dengan capaian ini, di saat pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja pembangunan manusia di seluruh wilayah menjadi terhambat. Tentu harapannya, pertumbuhan untuk kabupaten-kabupaten dengan capaian IPM sedang masih dapat lebih berakselerasi sehingga mampu setara dengan capaian IPM kabupaten/kota lain dengan status IPM tinggi atau sangat tinggi.

Gambar 2.14 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bali, 2019-2020

► Pertumbuhan IPM Tertinggi 2019-2020



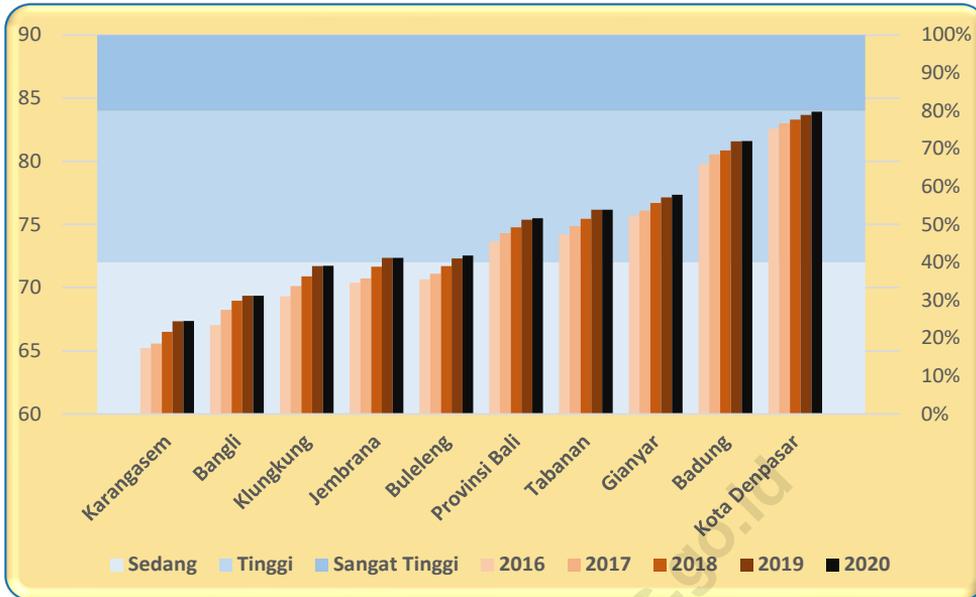
Pertumbuhan IPM Terendah 2019-2020 ◀



Sumber: BPS Provinsi Bali

Meninjau perubahan status pembangunan manusia di Provinsi Bali pada periode tahun 2016-2020, tercatat ada beberapa kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan pencapaian IPM ke tingkatan status yang lebih tinggi. Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng berhasil meningkat dari status sedang ke status tinggi. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tercatat berhasil meningkat dari status tinggi ke sangat tinggi. Faktor yang menjadi pembeda peningkatan tersebut adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini dipengaruhi oleh kecepatan pertumbuhan yang mampu dihasilkan dari proses pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota.

Gambar 2.15 Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Bali, 2016-2020



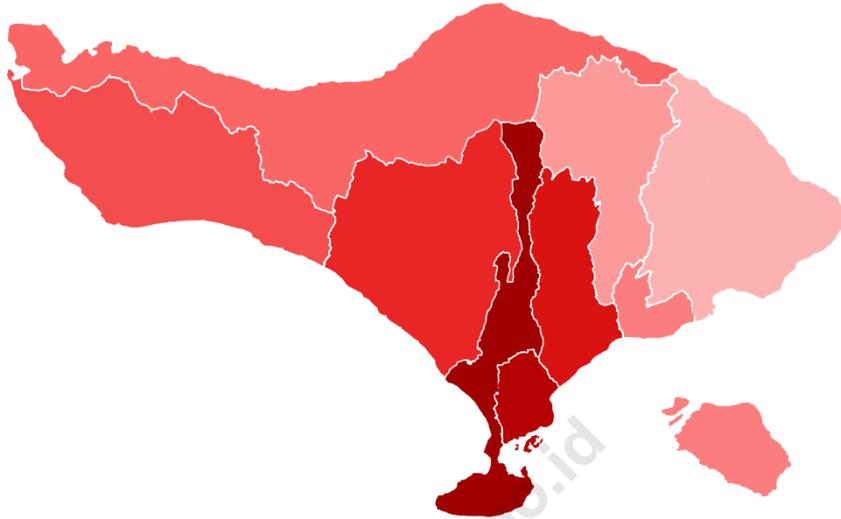
Sumber: BPS Provinsi Bali

2.4. Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Mencermati lebih rinci pembangunan manusia di kabupaten/kota menurut dimensi dan capaian komponen-komponen penyusun IPM disajikan dalam pokok bahasan berikut ini.

Pembangunan manusia pada dimensi umur panjang dan hidup sehat mencatat UHH tertinggi dicapai oleh Kabupaten Badung dengan UHH 75,10 tahun dan terendah Kabupaten Karangasem dengan UHH 70,47 tahun. Namun, dilihat dari sisi kecepatan pertumbuhan UHH, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Kabupaten Klungkung (0,27%). Kabupaten Bangli dan Buleleng tercatat tumbuh 0,21 persen atau naik 0,15 poin dibanding tahun 2019, dan Kabupaten Jembrana tumbuh sebesar 0,19 persen atau naik 0,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

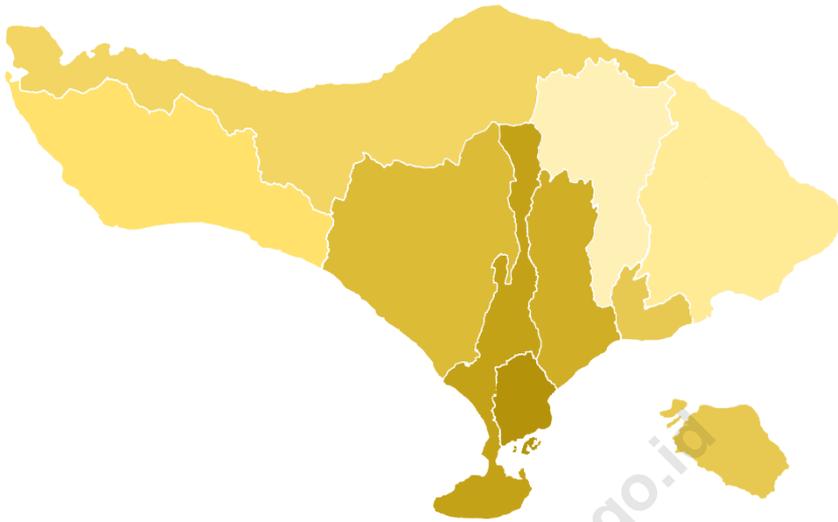
Gambar 2.16 Tingkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten Kota di Bali, 2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Untuk dimensi pendidikan, HLS tertinggi tercatat di Kota Denpasar (14,00 tahun) dan terendah di Kabupaten Bangli (12,34 tahun). Kecepatan pertumbuhan HLS tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Buleleng (1,24%), disusul oleh Kabupaten Gianyar yang mampu tumbuh sebesar 0,65 persen dan Jembrana yang mampu tumbuh sebesar 0,16 persen. Kabupaten Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Klungkung kompak tumbuh sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tercatat tumbuh masing-masing 0,07 persen atau naik 0,01 poin dibanding tahun 2019.

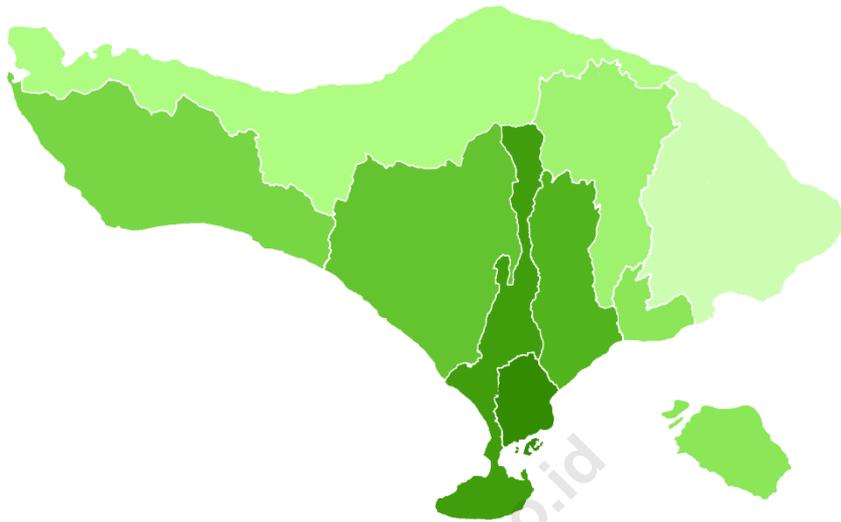
Gambar 2.17 Tingkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Bali, 2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Untuk RLS tertinggi tercatat di Kota Denpasar, yakni selama 11,47 tahun dan terendah selama 6,32 tahun tercatat di Kabupaten Karangasem. Ketimpangan pendidikan terlihat dari jarak RLS yang tercatat hingga 5,15 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk berumur 25 tahun ke atas di Kota Denpasar telah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA kelas II (tingkat XII), sedangkan penduduk di Kabupaten Karangasem rata-rata bersekolah hingga SD kelas 6. Kecepatan pertumbuhan tertinggi tercatat di Kabupaten Buleleng yang tercatat 2,26%, disusul oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,14% dan Kabupaten Gianyar yang mencatatkan pertumbuhan 1,12% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Karangasem dengan capaian RLS terendah tercatat mampu tumbuh sebesar 0,16% atau meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian pada tahun 2020 ini, makin terlihat ketimpangan RLS antara capaian tertinggi dan terendah di Provinsi Bali. Diperlukan upaya keras untuk mengejar ketertinggalan RLS terutama di Kabupaten Karangasem.

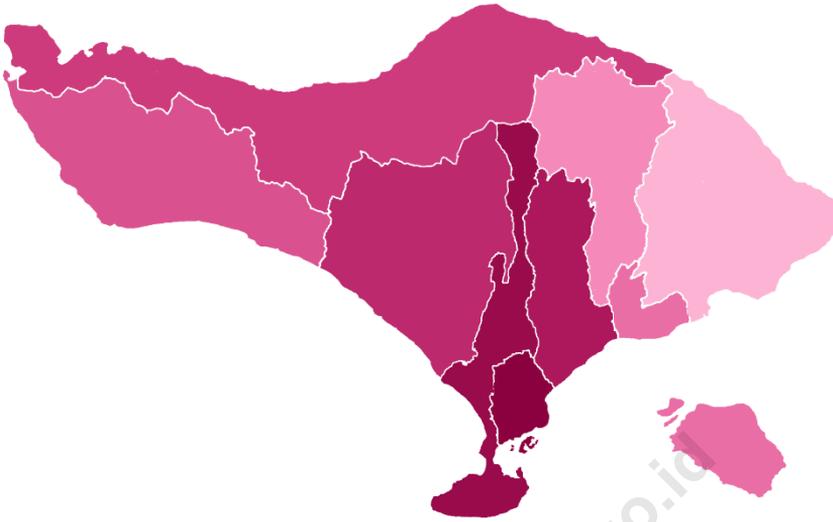
Gambar 2.18 Tingkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Bali, 2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita tertinggi dihasilkan di Kota Denpasar (19,72 juta rupiah per tahun) dan terendah di Kabupaten Karangasem (10,24 juta rupiah per tahun). Dengan adanya pandemi Covid-19, pengeluaran per kapita disesuaikan seluruh kabupaten/kota mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Pertumbuhan negatif terdalam dicatatkan oleh Kabupaten Buleleng yang mengalami penurunan sebesar 2,30 persen dibandingkan tahun 2019, disusul oleh Kota Denpasar yang mencatatkan pertumbuhan negatif terdalam kedua yaitu sebesar -1,35 persen. Sedangkan Kabupaten Karangasem tercatat tumbuh negatif 0,63 persen atau berkurang 65 ribu rupiah dibandingkan tahun 2019.

Gambar 2.19 Tingkat Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Sebagai catatan, gradasi warna pada peta tematik berurutan dari warna paling gelap ke warna paling terang menunjukkan urutan capaian tiap-tiap komponen penyusun IPM dari yang paling tinggi ke paling rendah.



BAB 3

**Peningkatan Kapabilitas
Dasar Manusia
Provinsi Bali**

3

PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA PROVINSI BALI

Sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada Oktober 2014 dan terpilih kembali pada tahun 2019, salah satu misi unggulan beliau adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan capaian pembangunan manusia nampaknya menjadi prioritas utama di semua kementerian. Hal ini terlihat wajar karena pemerintah ingin memanfaatkan bonus demografi yang sedang berjalan. Kesempatan ini dirasakan menjadi kesempatan emas namun dari sudut berbeda bisa menjadi tantangan yang besar. Kondisi ini bisa menjadi masalah pelik jika tidak menyediakan kesempatan kerja yang luas. Dengan harapan memiliki SDM berkualitas unggul, daya saing negara bisa meningkat. Apalagi di tengah perkembangan teknologi informasi revolusi industri 4.0 bahkan sudah akan merambah ke revolusi industri 5.0, persaingan dengan negara lain tidak bisa dibendung. Kualitas manusia Indonesia harus terus ditingkatkan sehingga bisa bersanding dengan negara lainnya dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

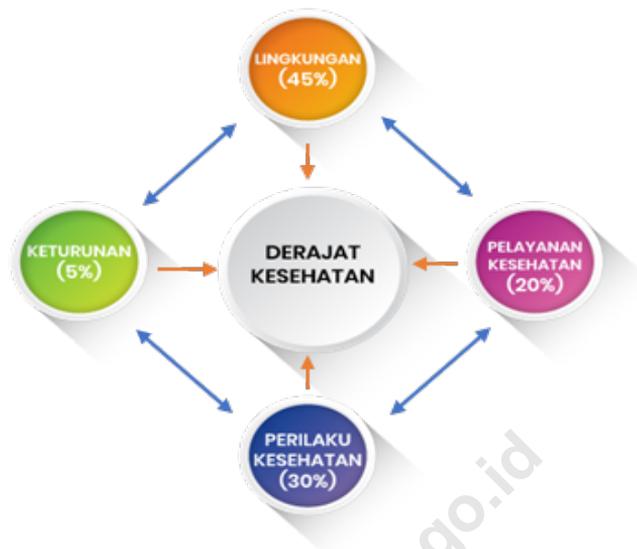
Di tengah badai pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia, capaian pembangunan manusia di Indonesia secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Walau demikian, di beberapa provinsi terjadi penurunan capaian pembangunan manusia dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar merasakan tekanan yang sangat berat pada komponen pengeluaran riil per kapita yang disebabkan karena menurunnya pendapatan masyarakat. Begitupun Provinsi Bali, capaian pembangunan manusianya masih menunjukkan hal yang menggembirakan, mampu tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, walau mengalami perlambatan.

3.1 Hidup Lebih Lama dan Kesehatan yang Lebih Baik

Pada masa pandemi seperti ini, kesehatan merupakan hal terpenting yang harus selalu dijaga. Pandemi Covid-19 yang melanda khususnya Bali pada bulan Maret 2020 telah memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Bali. Sampai akhir Desember 2020, jumlah yang terkonfirmasi positif Covid di Provinsi Bali hampir 18 ribu dengan kasus meninggal dunia sebanyak 523 orang. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara langsung. Praktek menjaga kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak telah patuh dilakukan oleh masyarakat Bali. Pada masa pandemi Covid-19 yang melanda Bali, kita merasakan sendiri bahwa masyarakat lebih tanggap terhadap kesehatan masing-masing. Sebelumnya mungkin tidak pernah mengkonsumsi vitamin sebagai tambahan asupan sehari-hari, pada masa pandemi ini makin rajin mengkonsumsi vitamin. Yang sebelumnya tidak rajin mencuci tangan, pada masa pandemi melakukan hal itu lebih sering begitu pula halnya dengan penggunaan masker jika berada di luar rumah. Dengan pelaksanaan berbagai penjangaan kesehatan tersebut, diharapkan dapat hidup lebih lama dan lebih berkualitas.

Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) dapat mengindikasikan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2020 capaian UHH Bali sebesar 72,13 tahun, meningkat 0,14 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2010-2020, UHH Bali meningkat 1,52 tahun atau rata-rata mampu tumbuh sekitar 0,21 persen setiap tahunnya.

Gambar 3.1 Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)



Sumber : Kementerian Kesehatan RI

Selain itu, indikator lain yang mampu menjelaskan tingkat kesehatan adalah angka kesakitan atau morbiditas. Morbiditas adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi morbiditas berarti menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan yang rendah akan meningkatkan tingkat mortalitas dan akhirnya berdampak dengan menurunkan umur harapan hidup. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) tahun 2020, angka morbiditas Bali tercatat sebesar 13,48 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari 15,96 persen di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Bali semakin membaik dalam setahun terakhir.

Berdasarkan teori Henrik L. Blum, tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen. Sementara itu, pengaruh per-

ilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan sebesar 5 persen. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodiharjo dkk, 1997).

a. Meningkatkan Kondisi Lingkungan yang Sehat

Sesuai dengan teori Blum, lingkungan menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan, yaitu sebesar 45 persen. Pengelolaan lingkungan yang baik sesungguhnya mampu meminimalisir bahkan mencegah timbulnya penyakit. Pentingnya menjaga kondisi lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman kiranya mampu meningkatkan kualitas kesehatan. Selain diperlukan peran pemerintah dalam menjaga kondisi lingkungan secara umum, peran mandiri masyarakat juga memegang peranan penting dalam upaya ini.

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, sumber air minum layak, dan jenis lantai terluas. Berdasarkan data Susenas tahun 2020, menunjukkan bahwa 96,57 persen rumah tangga di Bali yang sudah memiliki/menggunakan fasilitas tempat buang air. Dengan kata lain masih ada 3,43 persen rumah tangga di Bali yang tidak memiliki/menggunakan fasilitas tempat buang air.

Indikator lain adalah akses sanitasi layak yang merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik). Faktor sanitasi sangat penting karena masyarakat membutuhkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka fasilitas tersebut akan rentan dalam menularkan dan menumbuhkan penyakit. Pada tahun 2020, dari rumah tangga yang tersedia fasilitas buang air besar, hampir semuanya sudah menggunakan leher angsa yaitu 99,44 persen dan 96,49 persen rumah tangga juga sudah menggunakan tangki septik sebagai pembuangan tinja. Capaian ini berpengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat.

Dari sisi sumber air minum, sebesar 97,36 persen rumah tangga di Bali pada tahun 2020 memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Artinya hanya masih sekitar 2,64 persen rumah tangga di Bali yang kondisi sumber air minumnya rentan terhadap infeksi penyakit. Meski tergolong sedikit yang belum memiliki akses ini, bantuan pemerintah seperti penyuluhan mengenai penggunaan air bersih oleh masyarakat, sekaligus juga pemberian fasilitas air bersih kiranya masih diperlukan.

Gambar 3.2 Indikator Lingkungan Bali, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indikator lainnya yang juga cukup berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan adalah jenis lantai rumah masyarakat. Syarat yang paling penting adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Kriteria lantai yang baik adalah yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah karena tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2020, hanya sekitar 0,85 persen rumah tangga di Bali yang jenis lantai terluasnya adalah tanah. Nampaknya hal ini terkait dengan kondisi rumah tangga tersebut yang masih dalam kategori miskin. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

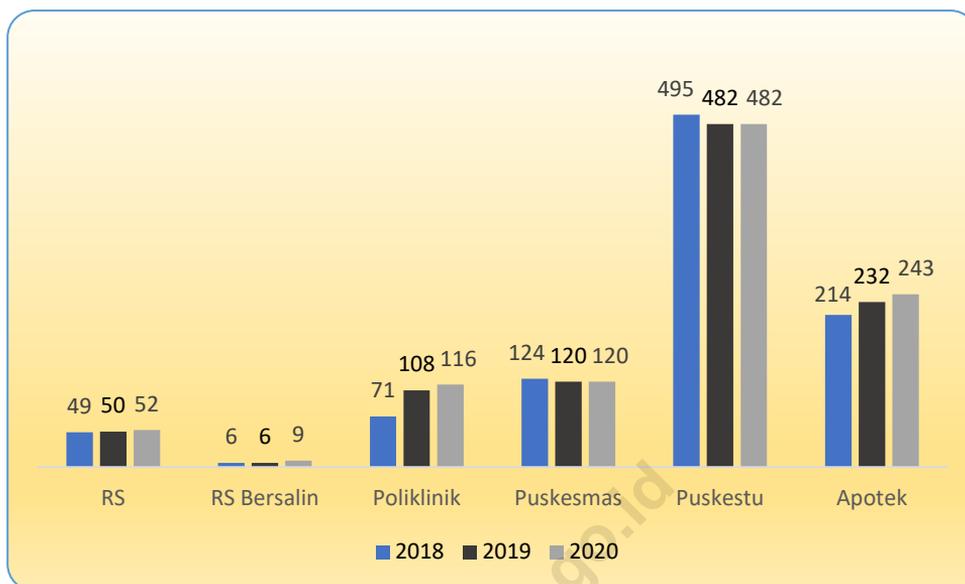
Dengan melihat keempat indikator diatas, secara umum derajat kesehatan masyarakat di Bali sudah dalam kondisi baik. Seluruh capaian indikator menunjukkan nilai diatas 90 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Bali memiliki kondisi kesehatan lingkungan yang sudah bagus. Upaya memperbaiki lingkungan kiranya masih perlu dilakukan dalam mencapai kondisi yang ideal atau minimal mempertahankan kondisi yang ada saat ini. Dengan lingkungan sehat, penularan berbagai penyakit bisa dicegah sehingga akan mengurangi angka morbiditas yang pada akhirnya akan menambah angka harapan hidup.

b. Fasilitas Kesehatan Terus Meningkat

Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk, pemeliharaan fasilitas kesehatan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) rata-rata jumlah kesehatan selama periode 2014-2018 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas kesehatan. Di antara fasilitas tersebut, puskesmas terbantu merupakan sarana kesehatan yang keberadaannya paling banyak di Bali. Dari sisi persentase peningkatan, sarana poliklinik meningkat paling tinggi selama setahun terakhir, tercatat naik sebesar 7,41 persen.

Gambar 3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan di Bali, 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

c. Kesadaran terhadap Perilaku Sehat Membaik

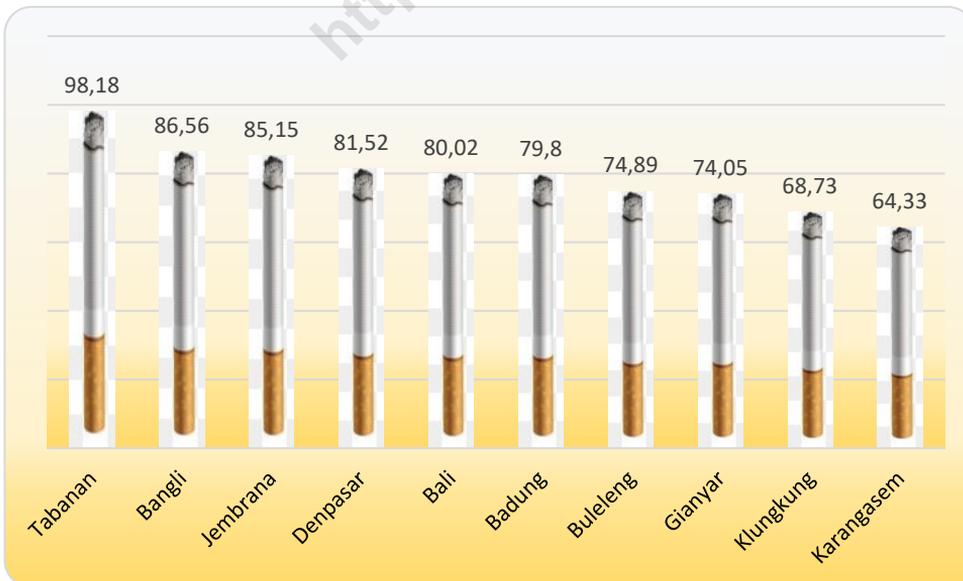
Perilaku sehat sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dalam teori Blum, perilaku sehat menyumbang 30 persen dalam mengukur derajat kesehatan manusia. Salah satu contoh perilaku sehat adalah tidak merokok, rajin mencuci tangan, serta memakai masker pada masa pandemi. Tahun 2020 memang menjadi tantangan yang cukup berat bagi penduduk seluruh dunia. Pasalnya, pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan lebih ketat seperti harus lebih rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak antar sesama demi tidak tertular Virus Corona yang menjadi penyebab Covid-19.

Kebiasaan-kebiasaan baru tersebut secara tidak langsung telah meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di tengah gempuran penularan virus yang tidak bisa dikatakan ringan. Berdasarkan survei perilaku masyarakat terhadap Covid-19 di Bali, sebagian besar masyarakat telah patuh terhadap anjuran protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hampir 90 persen lebih masyarakat Bali telah memakai masker, rajin mencuci tangan,

serta menjaga jarak dengan sekitarnya. Kita merasakan sendiri bahwa selama setahun pandemi, kita lebih waspada terhadap gejala-gejala ringan dan segera melakukan tindakan baik itu preventif maupun curatif.

Sementara itu, kebiasaan menghindari merokok oleh sebagian penduduk Bali sepertinya masih sulit dilakukan, khususnya penduduk laki-laki. Bahaya rokok bagi kesehatan sangat besar karena mengandung nikotin. Menurut Sue Armstrong (1991), nikotin merupakan bahan kimia yang tidak berwarna dan merupakan salah satu racun paling keras. Dalam jumlah besar, nikotin sangat berbahaya, yaitu antara 20 mg sampai 50 mg nikotin dapat menyebabkan terhentinya pernapasan. Selain nikotin, rokok juga mengandung karbon monoksida dan tar yang berbahaya bagi kesehatan (Mandagi, 1996). Tidak hanya kandungan zatnya, asap rokok juga berbahaya karena mengandung polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu seseorang yang merokok tidak hanya membahayakan dirinya namun juga orang-orang sekitarnya yang umum disebut perokok pasif.

Gambar 3.4 Jumlah Konsumsi Rokok per Kapita Sebulan di Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020 (batang)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Konsumsi rokok di Bali sebesar 80 batang per kapita per bulan. Konsumsi tertinggi di Kabupaten Tabanan yang mencapai 99 batang. Konsumsi rokok pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat hampir 80,40 batang per kapita per bulan menjadi 80,02 batang per kapita per bulan. Harapannya adalah konsumsi rokok terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Dampak buruk rokok tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga kemiskinan. Bahkan rokok termasuk dalam satu urutan komoditas yang memberikan sumbangan cukup tinggi terhadap garis kemiskinan.

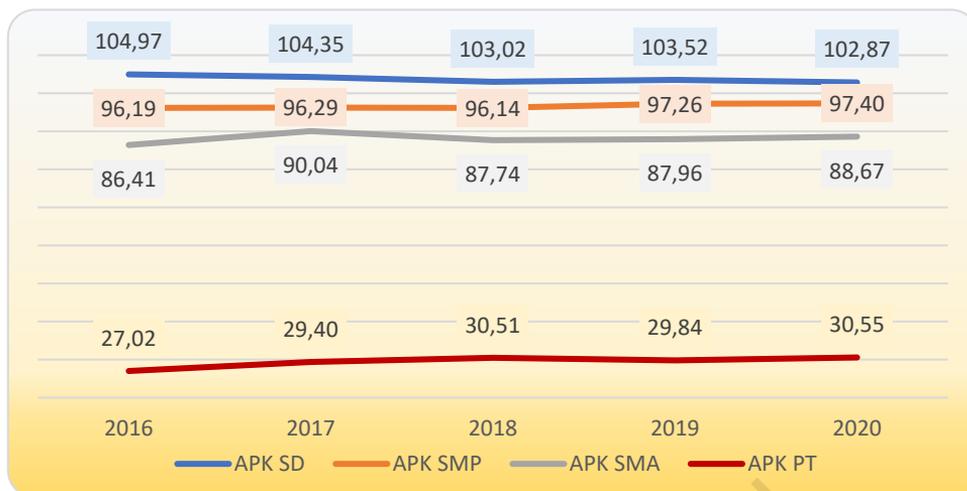
Dari beberapa indikator di atas, Umur Harapan Hidup di Provinsi Bali pada tahun 2020 meningkat. Walaupun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan umur harapan hidup berjalan lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 kecepatan tumbuh indikator ini adalah sebesar 0,43 persen, pada tahun 2020 kecepatannya menjadi 0,19 persen.

3.2 Pendidikan Memperluas Peluang

Pentingnya peran pendidikan sekiranya mampu memperluas peluang keberhasilan kehidupan, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Sebagitu dibutuhkannya peran pendidikan membuat pendidikan selalu menjadi salah satu prioritas utama baik di RPJMN maupun RPJMD.

Beberapa indikator yang mampu menunjukkan peran pendidikan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menggambarkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sementara itu, APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Bali, 2016-2020 (persen)

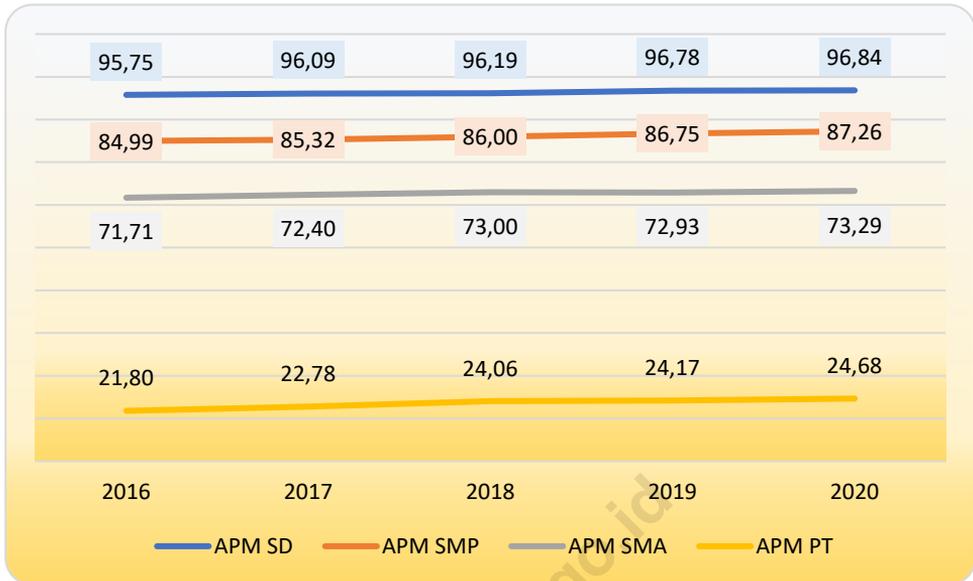


Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara umum, APK Bali mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020. Peningkatan tertinggi tercatat pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) yang meningkat 3,53 poin selama lima tahun terakhir. Hanya jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang mengalami penurunan, yaitu sedalam 2,10 poin. Walau mengalami penurunan, capaian APK untuk jenjang SD telah melampaui 100 persen. Pada tahun 2020, APK SD mencapai besaran 102,87 persen. Besaran APK yang lebih dari 100 persen diduga karena ada anak dibawah umur 7 tahun yang sudah masuk SD. Sementara itu, capaian APK PT tercatat sebagai yang terendah, yaitu sebesar 30,55 persen. Hal ini tentu saja disebabkan karena tidak semua tamatan SMA melanjutkan ke jenjang perkuliahan.

Indikator pendidikan lainnya yakni Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator ini lebih relevan dibandingkan dengan APK ketika mencari informasi gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Baik secara umum dan seluruh jenjang pendidikannya, APM Bali selama periode 2016 sampai 2020 tercatat meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi yang meningkat 2,88 poin sedangkan peningkatan terendah terjadi pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang hanya meningkat 1,09 poin.

Gambar 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Bali, 2016-2020 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

3.3 Peningkatan Standar Hidup Layak

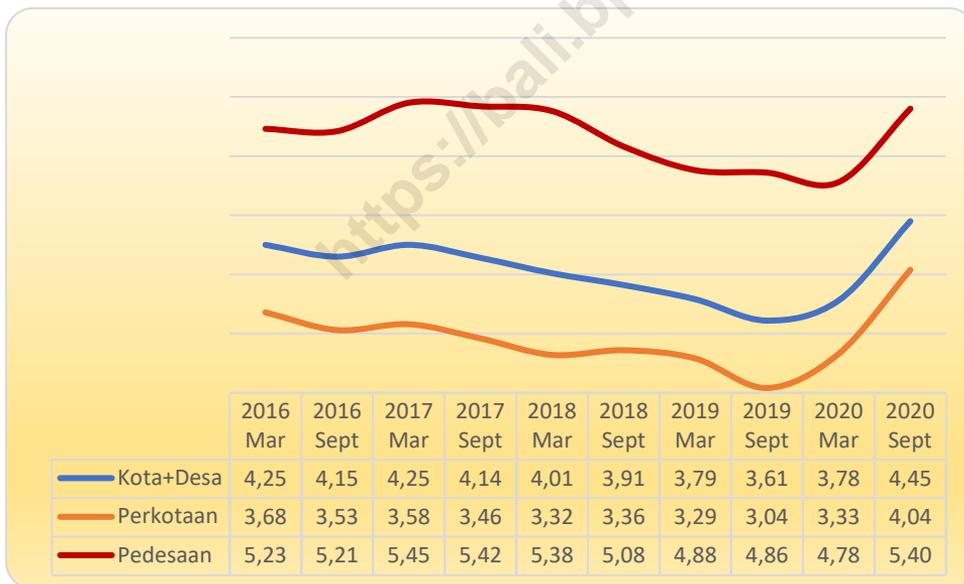
a. Pentingnya Pengurangan Angka Kemiskinan

Kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur dengan kemiskinan. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan. Faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia. Menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh satu sama lain.

Semenjak periode 2016 hingga 2019, persentase kemiskinan Bali cenderung menurun, namun dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 kemiskinan di Provinsi Bali meningkat tajam. Pada tahun 2016, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tercatat sebesar 4,15 persen. Besaran tersebut turun 0,54 poin menjadi 3,61 persen di tahun

2019. Kemudian pandemi Covid-19 pun melanda pulau dewata. Berbagai lini ekonomi terpukul cukup dalam. Mata pencaharian sebagian besar penduduk yang mendapatkan pendapatan dari jasa pariwisata dalam sekejap menghilang. Pendapatan masyarakat menurun, bahkan masyarakat yang tadinya ada sedikit di atas garis kemiskinan jatuh terpukul ke bawah garis kemiskinan dengan adanya pandemi ini. Pada akhirnya tahun 2020 mencatatkan angka kemiskinan sebesar 4,45 persen pada periode September. Jika melihat perbandingan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan, persentase kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi selama lima tahun terakhir ini. Pada September tahun 2020 tercatat sebanyak 5,40 persen penduduk miskin di perdesaan dan 4,04 persen penduduk miskin di perkotaan.

Gambar 3.7 Tren Kemiskinan di Bali Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2016-2020 (persen)

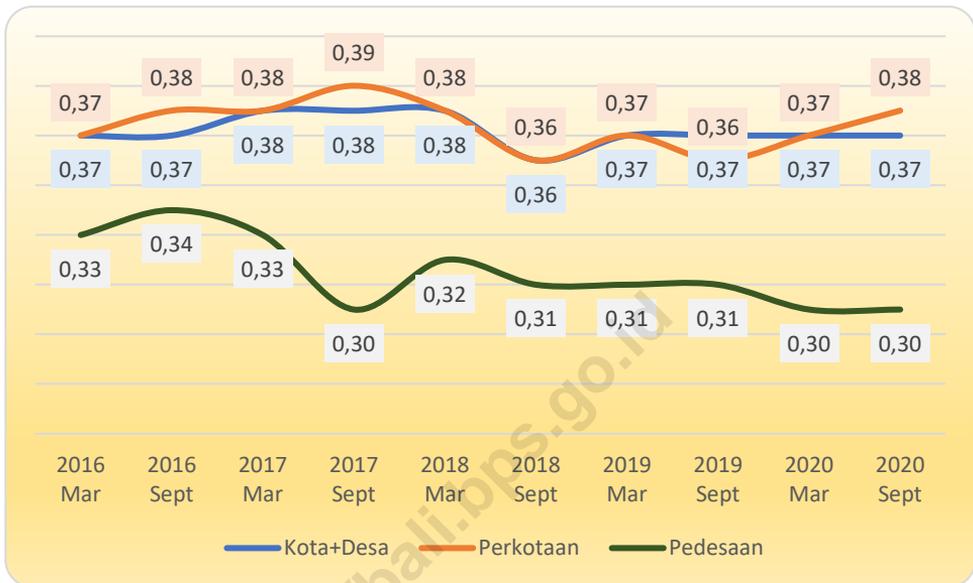


Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain peningkatan kemiskinan, ketimpangan pengeluaran penduduk juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang dicerminkan oleh gini rasio. Gini rasio Bali selama periode tahun 2016-2020 di angka 0,4 dan pada September 2018, gini rasio mencapai titik terendahnya

sebesar 0,36. Dengan adanya pandemi Covid-19 terlihat bahwa ketimpangan mengalami peningkatan khususnya di wilayah perkotaan.

Gambar 3.8 Tren Gini Rasio Menurut Perkotaan dan Perdesaan di Bali 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain berfokus pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan, hal yang tak kalah penting adalah pemerataan secara spasial baik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan namun dari sisi ketimpangan, perkotaan tercatat lebih tinggi. Selama periode 2016-2020, jarak gini rasio perkotaan dan perdesaan terlebar terjadi pada September 2017 yang berjarak 0,09 poin.

b. Pentingnya Penurunan Pengangguran

Selain masalah kemiskinan, masalah yang dirasa masih menjadi salah satu prioritas utama adalah masalah pengangguran. Tren perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Bali dalam periode 2016 sampai 2019 cenderung stagnan. Rendahnya TPT Bali bahkan terendah secara nasional membuat peluangnya untuk menurun menjadi sulit. Namun, kembali lagi

dampak dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tidak bisa dibilang kecil, apalagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali langsung mencuat naik mencapai 5,63 persen. Tergantungnya Bali terhadap pariwisata sungguh memukul perekonomian Bali pada masa pandemi Covid-19. Adanya larangan perjalanan ke luar negeri di beberapa negara penyuplai wisatawan Bali sungguh membuat lapangan kerja yang tadinya sangat terbuka luas di Bali menjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor.

Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali, 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik



BAB 4

Disparitas Pembangunan Manusia Provinsi Bali

4

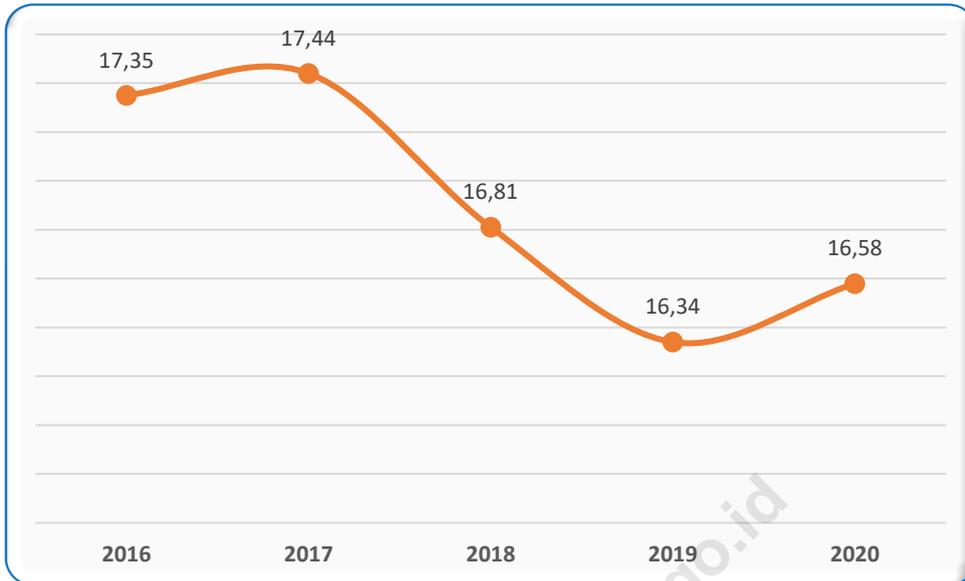
DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1 Disparitas Pembangunan Manusia di Provinsi Bali

Gambaran umum kesenjangan pembangunan manusia tingkat provinsi kiranya ditunjukkan dari disparitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota. Perbedaan latar belakang geografi, sosial, ekonomi yang berbeda-beda membuat capaian IPM di setiap wilayah menjadi bervariasi. Perubahan selisih antara wilayah yang memiliki capaian tertinggi dengan terendah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia tertinggi tercatat pada Kota Denpasar sedangkan terendah pada Kabupaten Karangasem. Selisih IPM kedua wilayah tersebut menunjukkan disparitas IPM Provinsi Bali.

Selama empat tahun terakhir (2016 s.d. 2019), secara umum disparitas pembangunan manusia Bali mengalami tren penurunan. Nilai disparitas IPM tertinggi tercatat pada tahun 2016 yang ketika itu mencapai 17,35 poin. Meski sempat meningkat pada tahun 2017, disparitas pembangunan manusia Bali kembali menurun pada tahun selanjutnya hingga menjadi sebesar 16,34 poin di tahun 2019. Namun, kembali lagi pandemi Covid-19 selain memperlambat laju capaian IPM Provinsi Bali, juga meningkatkan disparitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota se-Bali. Pada tahun 2020, kembali disparitas pembangunan manusia se-Bali meningkat menjadi 16,58 poin. Hal ini dapat menggambarkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, pembangunan manusia antar kabupaten/kota semakin timpang, dan diperlukan upaya-upaya perbaikan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan manusia di Provinsi Bali.

Gambar 4.1. Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Pada umumnya daerah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah berpeluang meningkat lebih cepat dibandingkan daerah dengan capaian manusia yang sudah tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan IPM selama lima tahun terakhir Kabupaten Karangsem lebih tinggi dibandingkan Kota Denpasar. Rata-rata pertumbuhan pertahun Kabupaten Karangsem tercatat sebesar 0,80 persen (menurun 0,21 poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2015-2019) sedangkan Kota Denpasar sebesar 0,41 persen (hanya turun sebesar 0,02 poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2015-2019). Menariknya, ternyata Kabupaten Bangli dan Klungkung memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode tahun 2016-2020. Keduanya tercatat rata-rata tumbuh sebesar 0,86 persen setiap tahunnya periode tahun 2016-2020.

Gambar 4.2. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bali 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

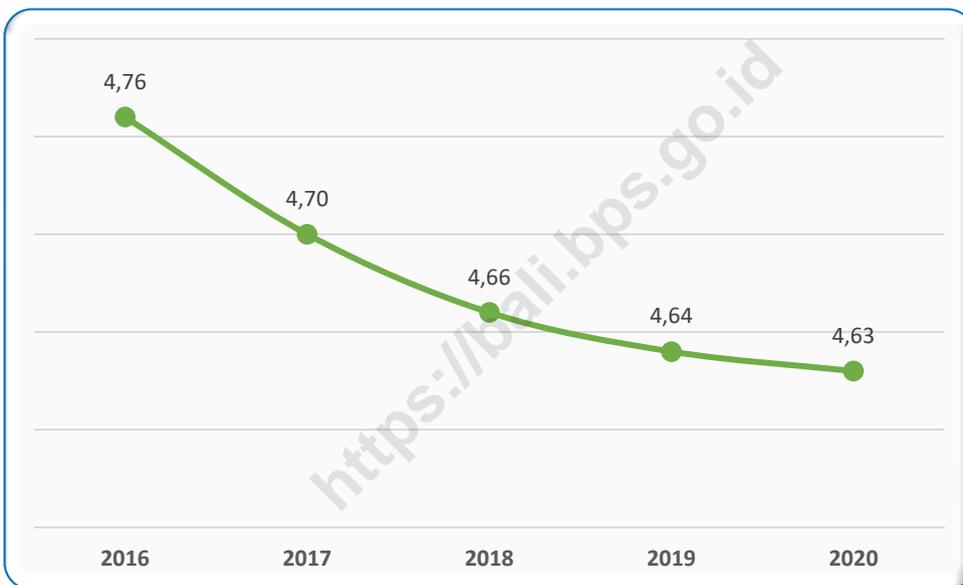
Dalam keadaan normal (sebelum pandemi), kesenjangan pembangunan manusia antara Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem memiliki tren yang semakin mengecil. Dalam artian, arah pembangunan Bali sudah dalam jalur yang benar. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, terjadi ketimpangan yang meningkat. Tentu saja, daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang lebih baik akan lebih bisa bertahan dibandingkan daerah-daerah yang minim fasilitas dan sumber daya. Kelengkapan dan kemudahan sarana prasarana sebagai daerah perkotaan tentunya membuat Kota Denpasar lebih mudah dalam memacu peningkatan kualitas manusianya. Sementara itu dari dominan pedesaan, Kabupaten Karangasem nampaknya masih memerlukan sentuhan pemerintah baik dari sisi dana maupun fasilitas dalam meningkatkan upaya pembangunan manusia.

a. Selisih Umur Harapan Hidup

Kesehatan merupakan impian berbagai orang. Dalam kondisi yang terhindar dari berbagai penyakit, kegiatan sehari-hari bisa lancar dilakukan tanpa ada gangguan yang berarti. Secara umum keadaan kesehatan

masyarakat Bali saat ini semakin membaik. Hal tersebut didukung pula dengan disparitas kesehatan antar kabupaten/kota yang semakin mengecil. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin dekatnya jarak antara Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi dengan terendah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 selisih UHH sebesar 4,76 tahun, disparitas tersebut terus mengalami penurunan per tahunnya hingga menjadi sebesar 4,63 tahun di tahun 2020.

Gambar 4.3. Selisih UHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Capaian UHH tertinggi tahun 2020 tercatat pada Kabupaten Badung yang tercatat sebesar 75,10 tahun. Besaran tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 di Kabupaten Badung diperkirakan mencapai umur 75 tahun. Sedangkan UHH terendah tercatat di Kabupaten Karangasem yaitu 70,47 tahun. Bayi yang lahir di Kabupaten Karangasem diperkirakan mencapai umur 70 tahun. Selisih capaian UHH tertinggi dan terendah menunjukkan terdapat disparitas UHH tahun 2020 Provinsi Bali yang sebesar 4,63 tahun. Disparitas UHH yang terus mengalami penurunan ini kiranya meng-

gambarkan pemerintah cukup berhasil dalam melakukan pemerataan pembangunan manusia dari segi kesehatan. Dari rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya, Kabupaten Klungkung mampu tumbuh paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yakni sebesar 0,34 persen. Disusul oleh Kabupaten Buleleng dan Bangli yang secara rata-rata tumbuh sebesar 0,30 persen selama periode yang sama. Sementara itu Kabupaten Badung tercatat rata-rata tumbuh 0,23 persen per tahunnya.

Gambar 4.4. Rata-rata pertumbuhan UHH Kabupaten/Kota di Bali 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

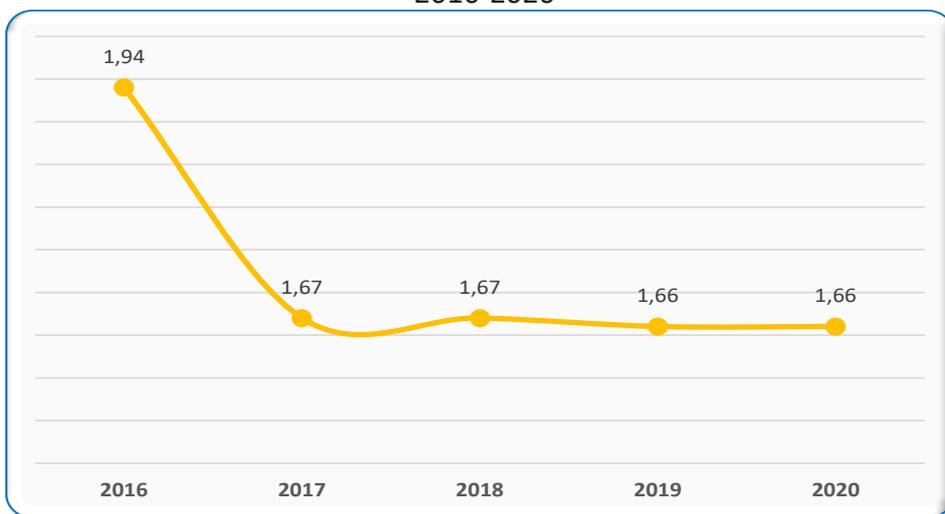
b. Selisih Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah

Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas kiranya peningkatan melalui mutu pendidikan perlu dilakukan. Tidak hanya mutu, pemerataan pembangunan manusia dari sisi pendidikan juga perlu diupayakan. Apalagi pada periode pemerintahan kali ini presiden melalui pidato kemerdekaan menyampaikan agar negara memiliki kualitas SDM yang unggul. Dengan kualitas SDM tersebut diharapkan Indonesia bisa maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Kesenjangan pembangunan manusia dari sisi pendidikan menjadi salah satu tantangan saat ini. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan penjagaan jarak dan kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR). Diperlukan kerjasama yang sangat apik antara pihak sekolah terutama guru, orang tua murid, dan murid itu sendiri. Jika kerjasama tersebut tidak terbangun optimal, pendidikan akan mengalami degradasi kualitas yang pada ujungnya akan meningkatkan kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat melalui disparitas dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Disparitas angka harapan lama sekolah ditunjukkan dari rentang perbedaan capaian tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selama lima tahun terakhir nilai disparitas HLS cenderung menurun. Pada tahun 2016 disparitas HLS tercatat sebesar 1,94 tahun. Lalu berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai 2020 walau dengan penurunan yang sangat tipis.

Gambar 4.5. Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Disparitas angka harapan lama sekolah di Bali dilihat dari perbedaan capaian antara Kota Denpasar sebagai yang tertinggi dan Kabupaten Bangli sebagai yang terendah. Pada tahun 2020, rata-rata penduduk usia 7 tahun di Kota Denpasar berpotensi menempuh pendidikan selama 14 tahun atau menyelesaikan tingkat II pada perguruan tinggi. Di tahun yang sama, penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Bangli tercatat berpotensi menempuh pendidikan selama 12,34 tahun atau sekitar tamat SLTA sederajat.

Kesenjangan yang cenderung menurun ini juga didukung dari rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Bangli yang lebih tinggi dibandingkan Kota Denpasar. Semenjak tahun 2016 sampai 2020, HLS Bangli rata-rata tumbuh sebesar 1,10 persen setiap tahunnya. Sedangkan Kota Denpasar rata-rata tumbuh 0,44 persen setiap tahunnya. Sisi lainnya, ternyata rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Klungkung lebih rendah dibandingkan Kota Denpasar bahkan tercatat sebagai yang terendah di Bali. Jika kondisi ini tetap berlanjut, maka nilai harapan lama sekolah Klungkung ke depannya bisa disusul kabupaten lainnya dan kesenjangan dengan wilayah capaian tertinggi semakin melebar.

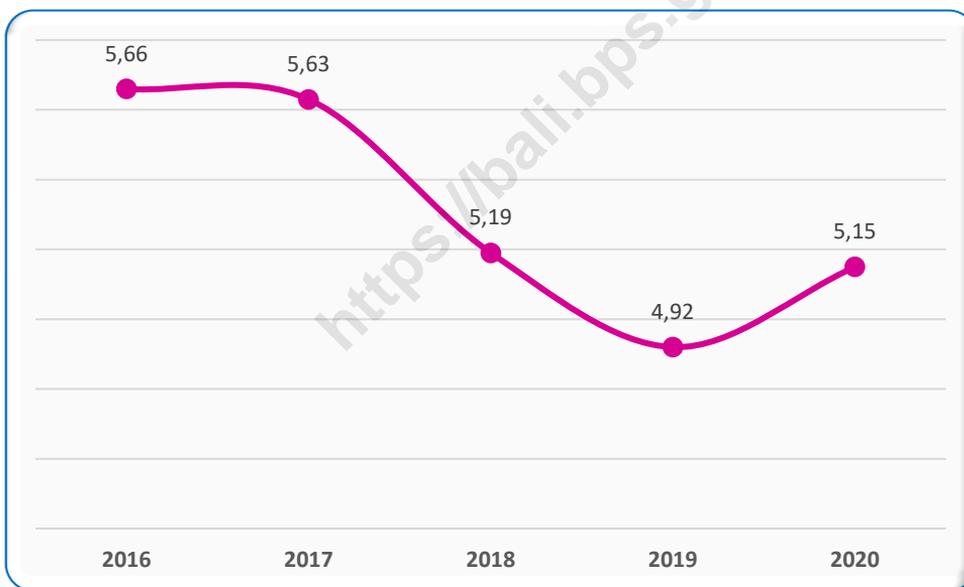
Gambar 4.6. Rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota di Bali, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Sementara itu disparitas rata-rata lama sekolah provinsi Bali ditunjukkan dari selisih rata-rata lama sekolah Kota Denpasar dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Karangasem. RLS Kota Denpasar menunjukkan capaian tertinggi sedangkan RLS Kabupaten Karangasem sebagai yang terendah. Secara umum disparitas RLS Bali cenderung menurun selama empat tahun terakhir, namun pada 2020 terjadi peningkatan disparitas. Dari Gambar 4.7 terlihat bahwa tren penurunan terjadi sampai tahun 2019. Diduga, efek pandemi Covid-19 telah mempengaruhi peningkatan disparitas antar kabupaten kota se-Bali. Disparitas pada tahun 2020 tercatat 5,15 tahun meningkat 0,23 poin dibandingkan tahun 2019.

Gambar 4.7. Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali 2016-2020



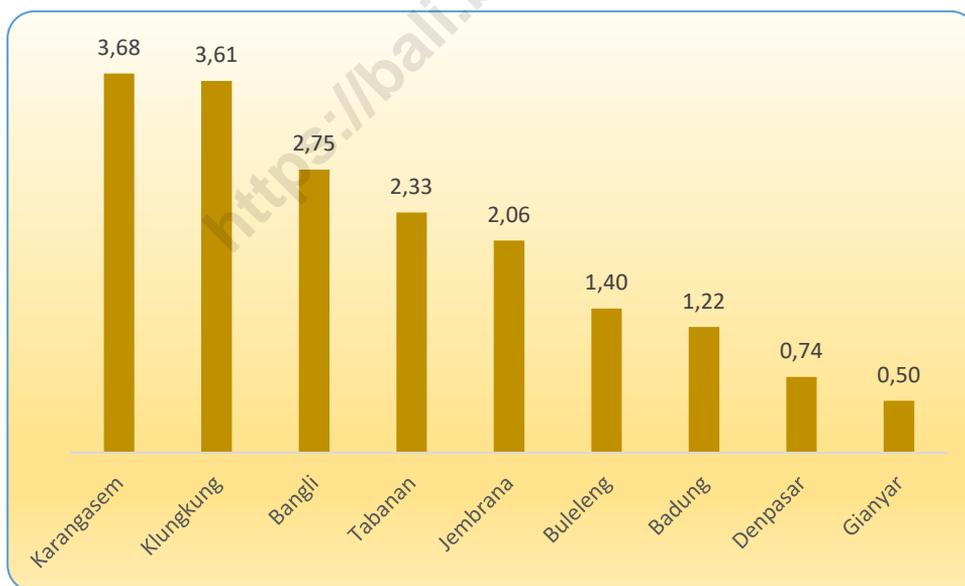
Sumber: BPS Provinsi Bali

Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah Kota Denpasar tercatat sebesar 11,47 tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kota Denpasar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan kelas dua SLTA. Sementara itu rata-rata lama sekolah Kabupaten Karangasem tercatat sebesar 6,32 tahun, yang menunjukkan rata-rata penduduk yang

berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan kelas enam Sekolah Dasar.

Dari sisi rata-rata pertumbuhan per tahun, sebagai wilayah dengan capaian tertinggi, RLS Kota Denpasar rata-rata tumbuh sebesar 0,74 persen per tahun. Sedangkan RLS Kabupaten Karangasem rata-rata tumbuh sebesar 3,68 persen per tahun. Perbedaan pertumbuhan yang lebih cepat di Kabupaten Karangasem dibandingkan Kota Denpasar menunjukkan kemungkinan disparitas RLS mengecil di beberapa tahun kedepan. Angka disparitas yang semakin pendek ini kiranya menggambarkan pemerataan sarana dan akses pendidikan oleh pemerintah sudah berjalan tepat. Hal ini harus tetap dipertahankan agar kesenjangan pada dimensi pendidikan semakin mengecil.

Gambar 4.8. Rata-rata Pertumbuhan RLS Kabupaten/Kota di Bali
2016-2020

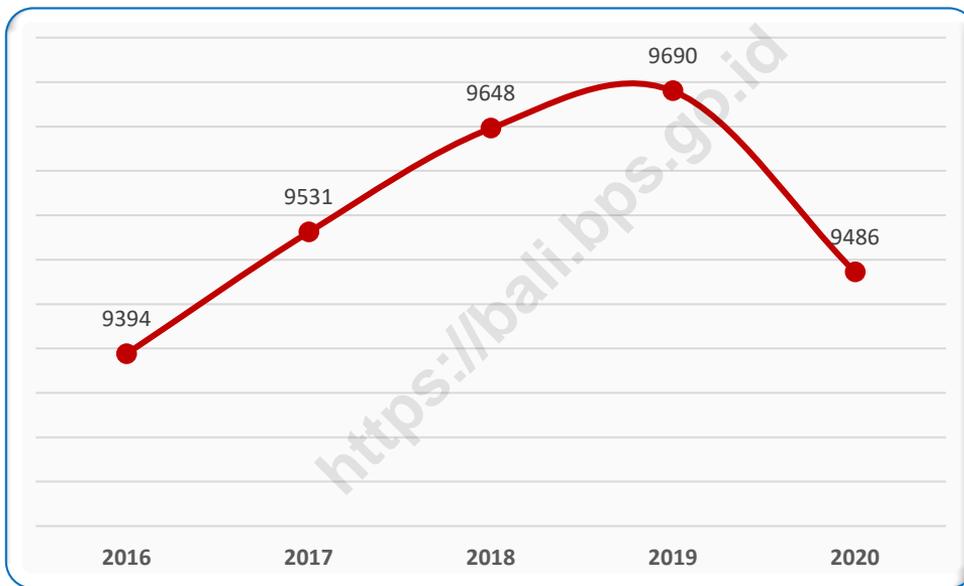


Sumber: BPS Provinsi Bali

c. Selisih Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir yakni dimensi standar hidup layak yang menjadi salah satu dimensi yang penting dalam menunjukkan kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi/didekati dengan indikator pengeluaran per kapita. Selama kurun waktu 2016 hingga 2020, indikator ini terus menunjukan peningkatan. Namun hal tersebut masih menyisakan persoalan kesenjangan antarwilayah.

Gambar 4.9. Selisih PPP Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Disparitas pengeluaran per kapita cenderung meningkat. Capaian pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi tercatat pada Kota Denpasar sedangkan terendah pada Kabupaten Karangasem. Selisih kedua capaian tersebut pada tahun 2016 bernilai sebesar 9,4 juta rupiah. Selisih tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 9,69 juta rupiah di tahun 2019, dan mengalami penurunan disparitas pada tahun 2020 yang mencatatkan selisih sebesar 9,5 juta rupiah

Jika melihat rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir, pertumbuhan pengeluaran per kapita Kota Denpasar rata-rata tumbuh sebesar 0,83 persen setiap tahunnya (mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19). Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Karangasem yang sebesar 1,39 persen. Jika kondisi ini bisa dipertahankan, grafik disparitas pengeluaran perkapita Bali nantinya akan semakin melandai yang artinya kesenjangan semakin mengecil.

Gambar 4.10. Rata-rata Pertumbuhan PPP Kabupaten/Kota di Bali 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

4.2 Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah

Secara umum, capaian tiga tertinggi maupun terendah di Bali cenderung seragam. Peringkat tertinggi IPM dicapai oleh Kota Denpasar, sedangkan peringkat kedua dan ketiga dicapai Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Komposisi tersebut juga hampir terjadi pada seluruh komponen pembentuk. Hanya pada komponen umur harapan hidup capaian Kota Den-

pasar tercatat lebih rendah dibandingkan Kabupaten Badung. Dominasi Kota Denpasar dalam pembangunan manusia di Bali nampaknya tidak terlepas dari kemudahan akses dan fasilitas yang ada di dalamnya. Selain itu, sebagai pusat ekonomi Bali, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di Kota Denpasar tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Sementara itu, capaian IPM terendah dicatatkan oleh Kabupaten Karangasem. Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung mencatatkan sebagai capaian terendah selanjutnya. Ketiga kabupaten tersebut hampir selalu ada dalam tiga terendah komponen pembentuk IPM. Hanya pada komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah terdapat kabupaten lainnya sebagai tiga terendah. Pada komponen harapan lama sekolah, Kabupaten Jembrana tercatat sebagai ketiga terendah sedangkan rata-rata lama sekolah, Kabupaten Buleleng tercatat sebagai ketiga terendah. Secara umum, Kabupaten Karangasem tercatat sebagai kabupaten yang hampir di seluruh komponen menjadi yang terendah. Hanya pada komponen harapan lama sekolah Kabupaten Bangli tercatat lebih rendah dibandingkan Kabupaten Karangasem.

Tabel 4.1 Posisi Kabupaten/Kota dengan Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah, 2020

Tertinggi				
Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Per Kapita	IPM
Badung	Kota Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar
Kota Denpasar	Badung	Badung	Badung	Badung
Gianyar	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Gianyar
Terendah				
Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Per Kapita	IPM
Karangasem	Bangli	Karangasem	Karangasem	Karangasem
Bangli	Karangasem	Bangli	Bangli	Bangli
Klungkung	Jembrana	Buleleng	Klungkung	Klungkung

4.3 Disparitas Pembangunan Manusia di Wilayah Sarbagita dan Non-Sarbagita

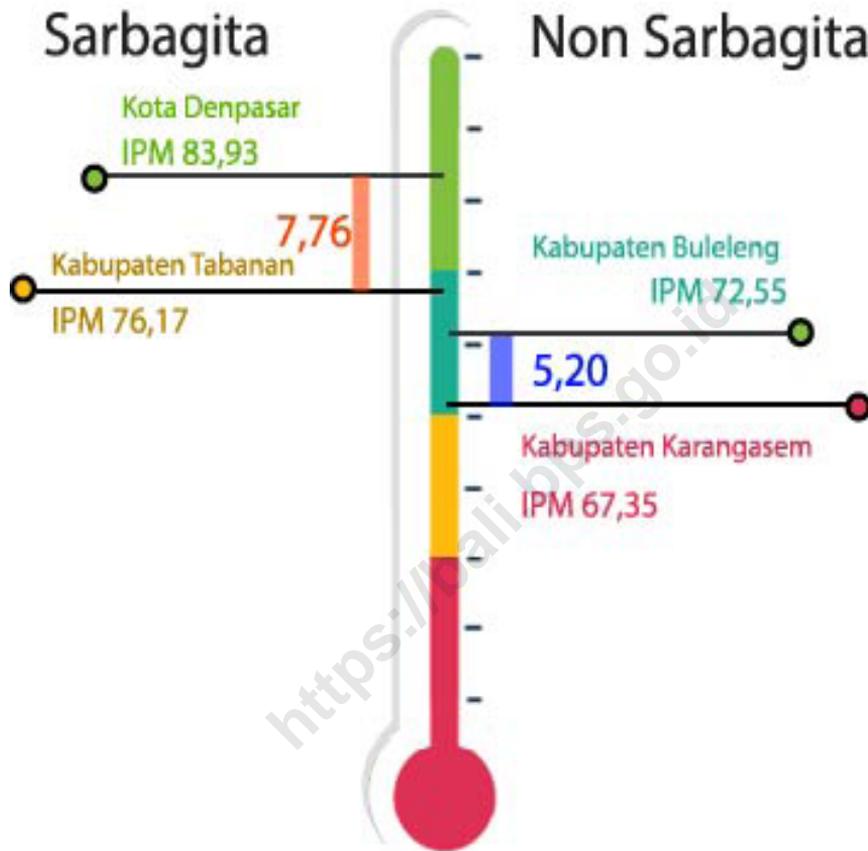
Sarbagita merupakan akronim dari Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Berdasarkan Perpres nomor 45 tahun 2011 selanjutnya yang diubah dengan Perpres nomor 51 tahun 2014, Sarbagita digadang-gadang sebagai wilayah metropolitan Bali. Dominan wilayah perkotaan, secara umum capaian pembangunan manusia di Sarbagita memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Non-Sarbagita. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkotaan memiliki kelebihan dan daya tarik tersendiri. Ketersediaan dan kemudahan fasilitas yang memadai membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan aktivitas. Selain itu kiranya pusat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya berpusat pada wilayah ini. Dari sisi ekonomi, wilayah Sarbagita memberikan kontribusi hampir 70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Bali.

Pada tahun 2020, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah Sarbagita adalah Kota Denpasar dengan IPM mencapai 83,93. Sementara itu, Kabupaten Buleleng mencatatkan sebagai kabupaten dengan capaian pembangunan manusia tertinggi untuk wilayah Non-Sarbagita. IPM Buleleng tercatat mencapai 72,55. Periode waktu yang sama, capaian pembangunan manusia untuk wilayah Sarbagita yang paling rendah adalah Kabupaten Tabanan. Kabupaten ini mencatatkan nilai IPM sebesar 76,17. Sedangkan untuk wilayah Non-Sarbagita, capaian pembangunan manusia terendah tercatat di Kabupaten Karangsem dengan IPM sebesar 67,35.

Perbedaan disparitas atau kesenjangan pembangunan manusia antara Sarbagita dengan Non Sarbagita tidak terlalu signifikan. Selisih IPM antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Tabanan berjarak 7,76 poin. Jika dibandingkan dengan kondisi wilayah Non-Sarbagita, selisih IPM Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangsem berjarak 5,20 poin. Kondisi tersebut mencerminkan disparitas pembangunan manusia yang terjadi di Non-Sarbagita hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di wilayah Sarbagita. Hal ini diduga karena dominasi Kota Denpasar sebagai ibukota

provinsi yang terlalu kuat dan atau jarak antar kabupaten di wilayah Non-Sarbagita yang tidak terlalu jauh dengan pusat perekonomian Bali.

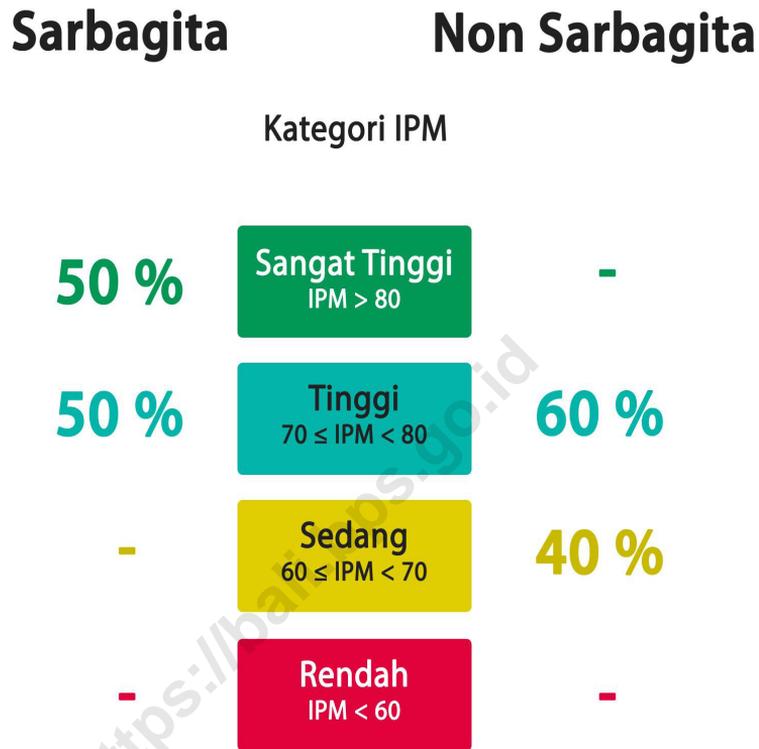
Gambar 4.11. Perbandingan IPM Wilayah Sarbagita dengan Non Sarbagita di Provinsi Bali, 2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Berdasarkan status pembangunan manusia, Sarbagita tercatat lebih maju dibandingkan Non-Sarbagita. Tahun 2020, sebagian wilayah Sarbagita tercatat sebagai status pembangunan manusia “sangat tinggi”. Sementara di wilayah Non-Sarbagita belum ada wilayah dengan capaian status tersebut. Sebagian wilayah Sarbagita lainnya tercatat sebagai status pembangunan manusia “tinggi”. Dari lima kabupaten dari wilayah Non-Sarbagita, tiga kabupaten (60 persen) berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Sedangkan wilayah lainnya masih berstatus pembangunan “sedang”.

Gambar 4.12. Perbandingan IPM Wilayah Sarbagita dengan Non Sarbagita di Provinsi Bali Menurut Status, 2020



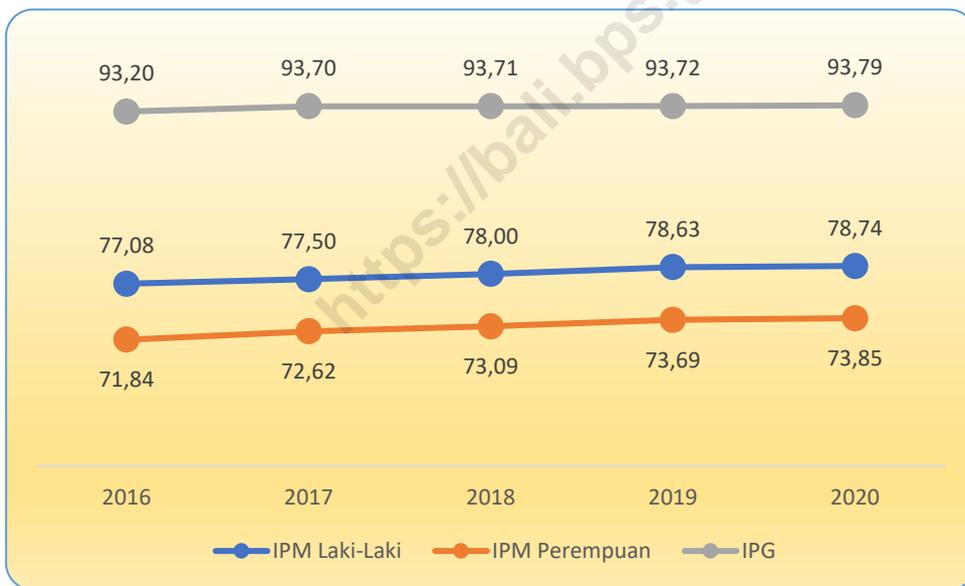
Sumber: BPS Provinsi Bali

4.4 Disparitas Pembangunan Manusia Berdasarkan Gender

Kesetaraan gender nampaknya sudah menjadi isu yang sudah sejak lama diperbincangkan. Pemaknaan kesetaraan gender terkait dengan ketimpangan antara keadaan dan kedudukan sosial ekonomi laki-laki dengan perempuan. Keterbatasan kesempatan memperoleh hak yang sama membuat kesenjangan antar kedua jenis kelamin kiranya semakin melebar. Isu kesetaraan gender sudah menjadi salah satu tujuan agenda pembangunan global yang bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs). Pada goal kelima, United Nations (UN) berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

Disparitas atau kesenjangan pembangunan manusia menurut gender bisa dilihat dari indikator indeks pembangunan gender (IPG). Nilai IPG yang semakin mendekati 100 mencerminkan semakin kecilnya ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Jika nilainya lebih dari 100, maka capaian pembangunan perempuan lebih tinggi dibandingkan capaian laki-laki, begitu juga sebaliknya. Pada tahun 2020, indeks pembangunan gender Bali tercatat sebesar 93,79. Artinya, capaian pembangunan manusia laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Indeks pembangunan manusia laki-laki pada tahun ini tercatat sebesar 78,74 sedangkan perempuan tercatat mencapai 73,85.

Gambar 4.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bali, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali

Berdasarkan komponen pembentuk IPM, hampir pada seluruh komponen jenis kelamin laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Pada dimensi pendidikan, angka harapan lama sekolah laki-laki tercatat 13,48 tahun, lebih tinggi 0,25 tahun dibandingkan angka harapan lama sekolah perempuan. Begitu juga pada indikator rata-rata lama sekolah, RLS laki-laki tercatat sebesar 9,68 tahun sedangkan RLS perempuan mencapai 8,21 tahun. Dari sisi ekonomi, rata-rata pendapatan per kapita laki-laki di Bali yang diproksi dengan rata-rata pengeluaran per kapita sekitar 16,94 juta rupiah selama setahun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita perempuan yang mencapai 13,47 juta rupiah selama setahun. Hanya pada dimensi kesehatan capaian laki-laki tercatat lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Umur harapan hidup laki-laki tahun 2020 tercatat 70,28 tahun sedangkan umur harapan hidup perempuan mencapai 74,03 tahun. Salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab adalah dari segi genetika. Secara kromosom, laki-laki memiliki kromosom XY sementara perempuan XX. Secara teori laki-laki cenderung lebih rentan penyakit dibandingkan dengan perempuan.

Daftar Pustaka

<http://undp.org/en/content/what-human-development>

Todaro, Michel P. dan Stephen C. Smith, *Economic Development/Eighth Edition*, Newyork: Pearson, 2003.

United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report 1990*. Newyork: UNDP.

<https://bali.bps.go.id>



Lampiran



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Usia Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/org/tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	69,93	14,31	9,33	9.492	71,99
Sumatera Utara	69,10	13,23	9,54	10.420	71,77
Sumatera Barat	69,47	14,02	8,99	10.733	72,38
Riau	71,60	13,20	9,14	10.675	72,71
Jambi	71,16	12,98	8,55	10.392	71,29
Sumatera Selatan	69,88	12,45	8,24	10.652	70,01
Bengkulu	69,35	13,61	8,84	10.380	71,40
Lampung	70,65	12,65	8,05	9.982	69,69
Kep. Bangka Belitung	70,64	12,05	8,06	12.794	71,47
Kepulauan Riau	69,96	12,87	10,12	14.209	75,59
DKI Jakarta	72,91	12,98	11,13	18.227	80,77
Jawa Barat	73,04	12,50	8,55	10.845	72,09
Jawa Tengah	74,37	12,70	7,69	10.930	71,87
D I Yogyakarta	74,99	15,59	9,55	14.015	79,97
Jawa Timur	71,30	13,19	7,78	11.601	71,71
Banten	69,96	12,89	8,89	11.964	72,45
Bali	72,13	13,33	8,95	13.929	75,50
Nusa Tenggara Barat	66,51	13,70	7,31	10.351	68,25
Nusa Tenggara Timur	67,01	13,18	7,63	7.598	65,19
Kalimantan Barat	70,69	12,60	7,37	8.930	67,66
Kalimantan Tengah	69,74	12,66	8,59	11.154	71,05
Kalimantan Selatan	68,66	12,68	8,29	12.032	70,91
Kalimantan Timur	74,33	13,72	9,77	11.728	76,24
Kalimantan Utara	72,59	12,93	9,00	8.756	70,63
Sulawesi Utara	71,69	12,85	9,49	10.791	72,93
Sulawesi Tengah	68,69	13,17	8,83	9.335	69,55
Sulawesi Selatan	70,57	13,45	8,38	11.079	71,93
Sulawesi Tenggara	71,22	13,65	9,04	9.331	71,45
Gorontalo	68,07	13,08	7,82	10.020	68,68
Sulawesi Barat	65,06	12,77	7,89	9.168	66,11
Maluku	65,98	13,96	9,93	8.732	69,49
Maluku Utara	68,33	13,67	9,04	8.032	68,49
Papua Barat	66,02	12,91	7,60	8.086	65,09
Papua	65,79	11,08	6,69	6.954	60,44
INDONESIA	71,47	12,98	8,48	11.013	71,94

Lampiran 2. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2016-2020

Provinsi	IPM				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	70,00	70,60	71.19	71,90	71,99
Sumatera Utara	70,00	70,57	71.18	71,74	71,77
Sumatera Barat	70,73	71,24	71.73	72,39	72,38
Riau	71,20	71,79	72.44	73,00	72,71
Jambi	69,62	69,99	70.65	71,26	71,29
Sumatera Selatan	68,24	68,86	69.39	70,02	70,01
Bengkulu	69,33	69,95	70.64	71,21	71,40
Lampung	67,65	68,25	69.02	69,57	69,69
Kep. Bangka Belitung	69,55	69,99	70.67	71,30	71,47
Kepulauan Riau	73,99	74,45	74.84	75,48	75,59
DKI Jakarta	79,57	80,06	80.47	80,76	80,77
Jawa Barat	70,05	70,69	71.30	72,03	72,09
Jawa Tengah	69,98	70,52	71.12	71,73	71,87
D I Yogyakarta	78,38	78,89	79.53	79,99	79,97
Jawa Timur	69,74	70,27	70.77	71,50	71,71
Banten	70,96	71,42	71.95	72,44	72,45
Bali	73,65	74,30	74.77	75,38	75,50
Nusa Tenggara Barat	65,81	66,58	67.30	68,14	68,25
Nusa Tenggara Timur	63,13	63,73	64.39	65,23	65,19
Kalimantan Barat	65,88	66,26	66.98	67,65	67,66
Kalimantan Tengah	69,13	69,79	70.42	70,91	71,05
Kalimantan Selatan	69,05	69,65	70.17	70,72	70,91
Kalimantan Timur	74,59	75,12	75.83	76,61	76,24
Kalimantan Utara	69,20	69,84	70.56	71,15	70,63
Sulawesi Utara	71,05	71,66	72.20	72,99	72,93
Sulawesi Tengah	67,47	68,11	68.88	69,50	69,55
Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70.90	71,66	71,93
Sulawesi Tenggara	69,31	69,86	70.61	71,20	71,45
Gorontalo	66,29	67,01	67.71	68,49	68,68
Sulawesi Barat	63,60	64,30	65.10	65,73	66,11
Maluku	67,60	68,19	68.87	69,45	69,49
Maluku Utara	66,63	67,20	67.76	68,70	68,49
Papua Barat	62,21	62,99	63.74	64,70	65,09
Papua	58,05	59,09	60.06	60,84	60,44
INDONESIA	70,18	70,81	71.39	71,92	71,94

Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2020

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	72,35	12,65	8,23	11.790	72,36
Tabanan	73,65	13,00	8,88	14.494	76,17
Badung	75,10	13,98	10,39	17.503	81,60
Gianyar	73,68	13,89	9,04	14.544	77,36
Klungkung	71,25	12,99	8,13	11.376	71,73
Bangli	70,52	12,34	7,17	11.268	69,36
Karangasem	70,47	12,41	6,32	10.237	67,35
Buleleng	71,83	13,07	7,24	13.463	72,55
Denpasar	74,82	14,00	11,47	19.723	83,93
BALI	72,13	13,33	8,95	13.929	75,50

Lampiran 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	72,21	12,63	8,22	11.902	72,35
Tabanan	73,53	12,99	8,87	14.608	76,16
Badung	74,99	13,97	10,38	17.628	81,59
Gianyar	73,56	13,80	8,94	14.623	77,14
Klungkung	71,06	12,98	8,12	11.484	71,71
Bangli	70,37	12,33	7,16	11.369	69,35
Karangasem	70,35	12,40	6,31	10.302	67,34
Buleleng	71,68	12,91	7,08	13.780	72,30
Denpasar	74,68	13,99	11,23	19.992	83,68
BALI	71,99	13,27	8,84	14.146	75,38

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	71,91	12,61	7,95	11.666	71,65
Tabanan	73,23	12,96	8,64	14.245	75,45
Badung	74,71	13,95	10,06	17.325	80,87
Gianyar	73,26	13,71	8,92	14.376	76,61
Klungkung	70,70	12,95	7,75	11.318	70,90
Bangli	70,05	12,31	7,13	11.160	68,96
Karangasem	70,05	12,39	5,97	10.050	66,49
Buleleng	71,36	12,89	7,04	13.235	71,70
Denpasar	74,38	13,98	11,16	19.698	83,30
BALI	71,68	13,23	8,65	13.886	74,77

Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2017

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	71,70	12,40	7,62	11.468	70,72
Tabanan	73,03	12,95	8,43	13.923	74,86
Badung	74,53	13,94	9,99	17.063	80,54
Gianyar	73,06	13,37	8,87	14.222	76,09
Klungkung	70,45	12,94	7,46	11.005	70,13
Bangli	69,83	12,30	6,80	10.956	68,24
Karangasem	69,85	12,38	5,52	9.833	65,57
Buleleng	71,14	12,62	7,03	12.995	71,11
Denpasar	74,17	13,97	11,15	19.364	83,01
BALI	71,46	13,21	8,55	13.573	74,30

Lampiran 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2016

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	71,57	12,27	7,59	11.343	70,38
Tabanan	72,89	12,87	8,10	13.800	74,19
Badung	74,42	13,66	9,90	16.567	79,80
Gianyar	72,95	13,36	8,86	13.766	75,70
Klungkung	70,28	12,86	7,06	10.852	69,31
Bangli	69,69	11,82	6,44	10.819	67,03
Karangasem	69,66	12,33	5,48	9.690	65,23
Buleleng	70,97	12,61	6,85	12.814	70,65
Denpasar	74,04	13,76	11,14	19.084	82,58
BALI	71,41	13,04	8,36	13.279	73,65

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan, No. 1 Renon, Denpasar

Telp.: (0361) 238159, Fax: (0361) 238162

Email: bps5100@bps.go.id

Homepage: <http://bali.bps.go.id>

